

PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2012-2021



SKRIPSI

OLEH:

PUPUT ANDRIA DEWI SITUMORANG
NPM : C1A019051

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU
2023

**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2012-2021**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi

OLEH:

PUPUT ANDRIA DEWI SITUMORANG
NPM : C1A019051

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU
2023

Skripsi oleh Puput Andria Dewi Situmorang ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Bengkulu, 20 Juli 2023
Pembimbing,

Merri Anitasari, SE.,MA
NIP. 19660503 199001 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Bambang Agoes Hermanto, SE.,M.SC
NIP. 19620819 198803 1 001

Bengkulu, 08 Agustus 2023

Skripsi oleh Puput Andria Dewi Situmorang

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada Rabu, 02 Agustus 2023

Ketua

Sekretaris

Merri Anitasari, SE.,MA
19660503 199001 2 001

Dr. Roosemarina Anggraini Rambe, SE.,MM
19710829 199702 2 001

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

DR. Ir. Lela Rospida, MM
19641220 199203 2 001

Septriani, S.E.,M.Ec.Dev
19890920 201903 2 018

Mengetahui
a.n Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Wakil Bidang Akademik

Dr. Fazhruzzaman, S.E., MDM. AK. CA., Asean. CPA
NIP. 197103131996011001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan kepada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik disengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Bengkulu, 26 Juli 2023

Puput Andria Dewi S

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Demi terangnya waktu siang, dan demi malam tatkala sunyi senyap. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, dan tidak benci dengan mu. Dan sesungguhnya yang akhir itu lebih baik bagimu dari pada yang permulaan”

(Adh-Dhuha, 93:1-4)

Masa depanmu ada ditangan mu sendiri, bekerja keraslah

PERSEMBAHAN :

Allhamdulillah Maha Besar Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah Nya sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada :

- Untuk kedua orang tua saya, tiada kata yang cukup untuk diekspresikan begitu berterimakasihnya anak mu atas segala air mata, keringat demi selesainya studi S1 ini. Terima kasih atas doa, nasehat, teladan, dukungan dan cinta serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada anak pertamanya selama ini. Semoga dengan selesainya studi S1 ini akan menjadi batu lompatan agar bisa menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat. Semoga dengan selesainya studi S1 ini juga bisa membuat Ayah dan Umak bahagia dan bangga. Semoga Ayah dan Umak selalu diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah SWT.
- Untuk ketiga adik saya, terima kasih sudah selalu menjadi penyemangat dan mendorong kesuksesan bagi saya sendiri untuk selalu membuktikan keberhasilan saya disini. Gelar S1 yang saya raih ini semoga dapat menjadi kebanggaan untuk kalian suatu saat ini dan menjadi contoh yang baik bagi kalian. Kalian semua selalu menjadi motivasi berharga bagi saya. Semoga kalian selalu dipermudah dan diberi kesuksesan dalam pendidikan dan agama oleh ALLAH SWT.
- Dan saya ucapkan terimakasih banyak kepada sahabat-sahabat rantau saya selama saya berkuliah di Bengkulu, untuk Indri T, Elvinda, Mayang, Wella, Atika, Leli, Ina, dan Dwi, terima kasih sudah banyak membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi saya dan terima kasih banyak sudah mau direpotkan dalam segala hal. Semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian, Aamiin.

COMPARATIVE OF REGENCY/CITY REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE IN NORTH SUMATRA PROVINCE, 2012-2021

Puput Andria Dewi Situmorang¹
Merri Anitasari²

ABSTRACT

This study aims to (1) analyze the comparison of the financial performance of the parent region and the expansion region in North Sumatra Province from 2012 to 2021, and (2) examine the relationship between regional financial performance and Gross Regional Domestic Product (GDP) in the parent region and the expansion region in North Sumatra Province from 2012 to 2021. The research method used is associative research with ratio analysis tools to analyze the comparison of financial performance between the parent region and the expansion region, and Pearson analysis to test the relationship between financial performance and GRDP at constant prices in the parent region and the expansion region. The results of the study show that (1) almost all parent regions show better economic performance than the new expansion regions. However, government financial performance measured through the capital expenditure ratio shows that newly formed regions have higher capital expenditure. (2) The relationship between regional financial performance as measured by the ratio of fiscal decentralization, the ratio of independence and the ratio of capital expenditure to Gross Regional Domestic Product has an insignificant relationship with a negative relationship direction with a very weak level of relationship strength in the parent region and the expansion region in North Sumatra Province in 2012-2021.

Keywords: Parent regions, expansion areas, regional financial performance, decentralization ratios, independence ratios, capital expenditure ratios

- 1) Student
- 2) Supervisor

PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012-2021

Puput Andria Dewi Situmorang¹
Merri Anitasari²

RINGKASAN

Pemekaran daerah merupakan pembangunan dari suatu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Pemekaran daerah menjadi sebuah tantangan bagi kinerja keuangan daerah induk karena berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah. Permasalahan bagi provinsi wilayah yang cukup luas, seperti Provinsi Sumatera Utara, menyebabkan timbulnya divergensi, kemampuan mengelola keuangan daerah sangat penting bagi pemerintah daerah. Melalui kinerja keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan perekonomian.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) membandingkan kinerja keuangan daerah induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012 hingga 2021, serta (2) melihat hubungan kinerja keuangan daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 -2021

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian asosiatif dengan alat analisis rasio untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan antara daerah induk dan daerah pemekaran serta analisis pearson untuk melihat hubungan kinerja keuangan daerah dengan PDRB atas dasar harga konstan daerah induk dan daerah pemekaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) hampir semua daerah induk memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik dibandingkan daerah pemekaran. Namun, kinerja keuangan pemerintah yang diukur melalui rasio belanja modal menunjukkan bahwa daerah pemekaran memiliki belanja modal yang lebih besar. (2) Hubungan kinerja keuangan daerah yang diukur melalui rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian dan rasio belanja modal dengan Produk Domestik Regional Bruto memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan arah hubungan negatif dengan tingkat kekuatan hubungan yang sangat lemah pada daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

Dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan daerah, penting bagi pemerintah daerah induk dan pemekaran untuk lebih mengoptimalkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal.

Kata kunci: Daerah Induk, Daerah pemekaran, Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Belanja Modal

- 1) Mahasiswa
- 2) Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr,wb

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021”**. Skripsi ini dibuat sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Merri Anitasari, SE.,MA selaku Dosen Pembimbing, telah bersedia membimbing penulis untuk menyelasikam Tugas akhir ini (Skripsi). Penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan masukan dan saran, serta motivasi untuk tetap semangat. Tanpa masukan, saran dan jasa dari ibu, skripsi ini tidak akan mungkin bisa diselesaikan.
2. Tim penguji skripsi yang bersedia memberikan masukan, ibu Dr. Roosemarina Aggraini Rambe, SE.,MM sebagai sekretaris penguji, Ibu Dr.Ir.Lela Rospida,MM sebagai Anggota Penguji 1, dan Ibu Septriani,S.E.,M.Ec.Dev sebagai Anggota Penguji 2 telah memberikan masukan serta saran da membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Dr Bambang Agoes Hermanto, SE., M.Sc selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu beserta seluruh staf yang telah memberikan rekomendasi dan memfasilitasi penulis untuk dapat Menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi).
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan khususnya Jurusan Ekonomi Pembangunan, yang telah memberikan pengetahuan juga pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan hingga penulisan skripsi

5. Bapak Azman Situmorang dan Ibu Anna Dewi Pasaribu atas do'a, dukungan serta kasih sayang yang selalu mengalir kepada penulis sampai kapanpun, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat berlimpah kepada keduanya.
6. Serta untuk diri saya sendiri terima kasih telah bertahan dalam menikmati proses panjang skripsi. Telah melalui berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan maupun proses revisi. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik saya, dan memotivasi saya untuk lebih belajar lagi membuat karya lainnya.
7. Rekan seperjuangan, mahasiswa Ekonomi Pemabangunan angkatan 2019, terkhususnya *Milineal International Class* (MILITER-C) terimakasih sudah banyak memberikan banyak kesan dan kenangan selama perkuliahan. Doa terbaik untuk kita semua, semoga harapan, impian, dan tujuan kita tercapai dengan baik.
8. Untuk seluruh rasa cinta dan hormat kepada segala pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak membantu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bengkulu, 26 Juli 2023

Penulis,

Puput Andria Dewi Situmorang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah dan pertanyaan penelitian	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Value For Money	15
2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah	15
2.1.3 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	16
2.1.4 Analisis Rasio Keuangan pada APBD.....	16
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	21
2.1.6 Konsep Pemekaran Wilayah	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Pengembangan Hipotesis	25
2.4 Rerangka Penelitian.....	25
 BAB III METODE PENELITIAN	 26
3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian	26
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	26
3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data	27
3.3.1 Jenis dan sumber data	27
3.3.2 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.4 Metode Analisis Data	28
3.4.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif	28
3.4.1.1 Rasio Keuangan Pemerintah Daerah	28
3.4.1.1.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	28
3.4.1.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	29
3.4.1.1.3 Rasio belanja modal.....	29

3.4.2 Analisis Deskriptif Asosisatif	30
3.4.1.2 Analisis Korelasi Pearson	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Deskripsi Data	33
4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33
4.1.1.2 Pendapatan Daerah	35
4.1.1.3 Pendapatan Transfer	37
4.1.1.4 Belanja Daerah.....	39
4.1.1.5 Belanja Modal.....	41
4.1.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	43
4.1.2 Hasil Perhitungan.....	45
4.1.2.1 Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021	45
4.1.2.1.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	45
4.1.2.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	46
4.1.2.1.3 Rasio Keserasian Belanja Modal	47
4.1.2.4 Hasil Perhitungan Korelasi <i>Pearson</i>	53
4.1.2.5 Korelasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Produk Domestik Bruto (PDRB).....	59
4.2 Pembahasan	60
4.2.1 Analisis Kinerja Keuangan Daerah	60
4.2.3 Analisis Kondisi Kinerja Keuangan Daerah Induk dan Pemekaran.....	64
4.2.4 Analisis Korelasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).	67
BAB V PENUTUP	74
5.1 Simpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
5.1 Keterbatasan dan Rekomendasi Penelitian Selanjutnya.....	76
5.1.1 Keterbatasan Penelitian	76
5.2.1 Rekomendasi Penelitian Lanjutan	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daerah Pemekaran di Pulau Sumatera	2
Tabel 1.2 Daerah Induk dan Daerah Otonomi Baru Hasil Pemekaran.....	4
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah.....	17
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan daerah	18
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah.....	20
Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Efektivitas	21
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah.....	28
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian Keuangan daerah	29
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Rasio Belanja Modal Keuangan Daerah	29
Tabel 3.4 Klasifikasi Kinerja Keuangan Daerah	30
Tabel 3.5 Kriteria Kinerja Keuangan Daerah	30
Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Miliar Rupiah)	34
Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Miliar Rupiah)	36
Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012- 2021 (Miliar Rupiah)	38
Tabel 4.4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Miliar Rupiah)	40
Tabel 4.5 Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Miliar Rupiah)	42
Tabel 4.6 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012- 2021 (Miliar Ripiah)	44

Tabel 4.7	Perbandingan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Persentase)	46
Tabel 4.8	Perbandingan Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota Daerah induk dan daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Persentase)	47
Tabel 4.9	Perbandingan Rasio Keserasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021(Persentase).....	48
Tabel 4.10	Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/kota Induk dan Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.	50
Tabel 4.11	Kriteria Rasio Belanja Modal Kabupaten/kota Induk dan Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.	51
Tabel 4.12	Kriteria Rasio Belanja Modal Kabupaten/kota Induk dan Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.	52
Tabel 4.13	Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara 2012-2021.....	53
Tabel 4.14	Korelasi Rasio Desentralisasi Fiskal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Daerah Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021	54
Tabel 4.15	Korelasi Rasio Desentralisasi Fiskal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Daerah Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021	55
Tabel 4.16	Korelasi Rasio Kemandirian dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Daerah Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021	56
Tabel 4.17	Korelasi Rasio Kemandirian dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Daerah Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021	57
Tabel 4.18	Korelasi Rasio Belanja Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Daerah Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021	58
Tabel 4.19	Rasio Belanja Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Daerah Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021	59

Tabel 4.20 Korelasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Produk Domestik Bruto (PDRB)	59
--	----

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar1.1 Realisasi PAD Daerah Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)	6
Gambar1.2 Realisasi PAD Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)	7
Gambar1.3 Realisasi Belanja Modal Kabupaten Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah).....	8
Gambar1.4 Realisasi Belanja Modal Kabu paten/Kota Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)	9
Gambar1.5 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah).....	9
Gambar1.6 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah).....	10
Gambar 2.1 Rerangka Penelitian	25

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fskal antara Daerah Induk dan Daerah Pemekaran.....	84
Lampiran 2: Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian antara Daerah Induk dan Daerah Pemekaran	88
Lampiran 3: Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal antara Daerah Induk dan Daerah Pemekaran	93
Lampiran 4: Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan pada Daerah Induk dan Daerah Pemkaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021(Juta Rupiah)	95
Lampiran 5: Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Pemakran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021	96

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemekaran daerah merupakan pembangunan dari suatu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan daerah otonomi baru baik di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten yang dipisahkan dari induknya. Pemekaran daerah di Indonesia sudah terjadi sejak zaman kemerdekaan. Akan tetapi sejak reformasi dan terbitnya UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, pemekaran daerah di Indonesia semakin banyak terjadi.

Upaya Pemekaran wilayah merupakan suatu terobosan dalam upaya mempercepat pertumbuhan wilayah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Di era desentralisasi pemerintah saat ini, pemerintah daerah diberikan ruang dan wewenang serta kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam mempercepat laju pertumbuhan daerah. Pemekaran daerah atau desentralisasi merupakan sebuah aspirasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian kewenangan dan tanggungjawab untuk daerah otonom telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya, mengurus kepentingan tersebut dilakukan agar masyarakat lebih sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, pengangguran, pelayanan publik, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pemekaran daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1950. Pada awal kemerdekaan pada 17 agustus 1945 Indonesia hanya memiliki 8 Provinsi, yaitu: Sumatera, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi,

Maluku, Sunda Kecil serta dua daerah istimewa yakni Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang di dasarkan atas pengakuan kedaulatan RI oleh Raja Solo pada 1 September 1945 yang menggabungkan wilayah negerinya sebagai sebuah Daerah Istimewa setingkat Provinsi lalu di susul Yogyakarta pada 5 September 1945. Pada masa pergerakan kemerdekaan (1945-1949), Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia, dan sejumlah "negara-negara boneka" dibentuk Belanda dalam wilayah negara Indonesia. Pada tahun 1950, Provinsi Sumatra dipecah menjadi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara, Yogyakarta mendapat status provinsi "Daerah Istimewa".

Banyaknya keinginan untuk melakukan pembentukan daerah otonom baru baik berupa pemekaran maupun peningkatan status di berbagai daerah di Indonesia dan juga perkembangan dinamika di berbagai daerah dan pendukung yang ada, mendorong beberapa Provinsi di Pulau Sumatera melakukan pemekaran dengan berbagai mekanisme pembentukan daerah otonom baru (DOB).

Tabel 1. 1 Daerah Pemekaran di Pulau Sumatera

No	Provinsi	Jumlah Daerah Pemekaran
1	Aceh	13
2	Sumatera Utara	14
3	Sumatera Barat	5
4	Sumatera Selatan	9
5	Bengkulu	6
6	Lampung	10
7	Jambi	5
8	Riau	7
9	Kepulauan Riau	6
10	Bangka Belitung	4
Total	10	79

Sumber: Data Diolah (2023)

Pada tabel 1.1 menunjukan jumlah daerah pemekaran yang ada di pulau Sumatera, pulau Sumatera merupakan bagian dari Indonesia yang terdiri dari 10

provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jambi, Riau, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Dari tabel diatas, provinsi dengan jumlah daerah pemekaran terbanyak berada pada Provinsi Sumatera Utara, sedangkan provinsi dengan jumlah daerah pemekaran terendah berada pada Provinsi Bangka Belitung. Pembentukan daerah atau dalam hal ini pemekaran daerah tidak bisa dilakukan secara serampangan, terbukti adanya berbagai persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan pemekaran, dalam Pasal 5 Ayat (4) UU Pemerintah Daerah mengatur syarat teknis dari pembentukan daerah otonomi baru yang meliputi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat-syarat pemekaran daerah ini tentunya sudah sesuai dengan kriteria pada Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara saat memiliki luas wilayah 72.981,23 km² dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia dan pertama se-Sumatra mencapai lebih dari 14,94 juta jiwa dengan jumlah kabupaten dan kota terbanyak di pulau Sumatera, hingga saat ini ada 33 kabupaten dan kota yang tersebar di Provinsi Sumatera utara.

Dengan adanya kesesuaian syarat teknis dari pembentukan daerah otonomi baru pada Provinsi Sumatera Utara, memungkinkan terjadinya penambahan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Sumatera Utara di masa depan. Pemekaran di provinsi tersebut telah menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan jumlah Kabupaten/kota terbanyak di pulau Sumatera. Namun, banyaknya daerah pemekaran ini berdampak pada kondisi keuangan Indonesia. Secara langsung maupun tidak langsung, pembentukan DOB memberikan beban tambahan pada keuangan negara karena

membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur dan perangkat pemerintahan pada DOB setiap tahunnya. Seiring bertambahnya jumlah DOB yang terbentuk, kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur, sarana, dan prasarana pelayanan publik di daerah DOB juga terus meningkat. Akibatnya, anggaran transfer ke daerah dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan.

Rata-rata di setiap DOB, penerimaan dana perimbangan dari pusat tersebut lebih diarahkan pada pembangunan prasarana pemerintah seperti kantor pemerintah, rumah dinas, serta pengeluaran lain yang berkaitan dengan belanja pegawai. Pengeluaran terkait dengan belanja aparatur sipil ini jelas memiliki pengaruh yang sedikit kepada masyarakat sekitar. Penyediaan barang publik kepada masyarakat tentunya akan menjadi berkurang dikarenakan pada tahun-tahun awal pembentukan DOB, pembangunan lebih difokuskan kepada pembangunan fasilitas pemerintahan. Oleh karena itu, aliran DAU kepada daerah pemekaran menjadi opportunity loss terhadap penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik. (Maulana Arief, 2019).

Tabel 1. 2 Daerah Induk dan Daerah Otonomi Baru Hasil Pemekaran

Daerah induk	Nama Daerah Otonom Hasil Pemekaran	UU Pembentukan Daerah Otonom Hasil Pemekaran
Kabupaten Asahan	Kabupaten Batu Bara	No. 5 tahun 2007
Kabupaten Dairi	Kabupaten Pakpak Bharat	No. 9 tahun 2003
Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten Serdang Bedagai	No. 36 tahun 2003
Kabupaten Labuhanbatu	Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara	No. 22 tahun 2008 No. 23 tahun 2008
Kabupaten Nias	Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias Barat Kota Gunungsitoli Kabupaten Nias Selatan	No. 45 tahun 2008 No. 46 tahun 2008 No. 47 tahun 2008 No. 9 tahun 2003

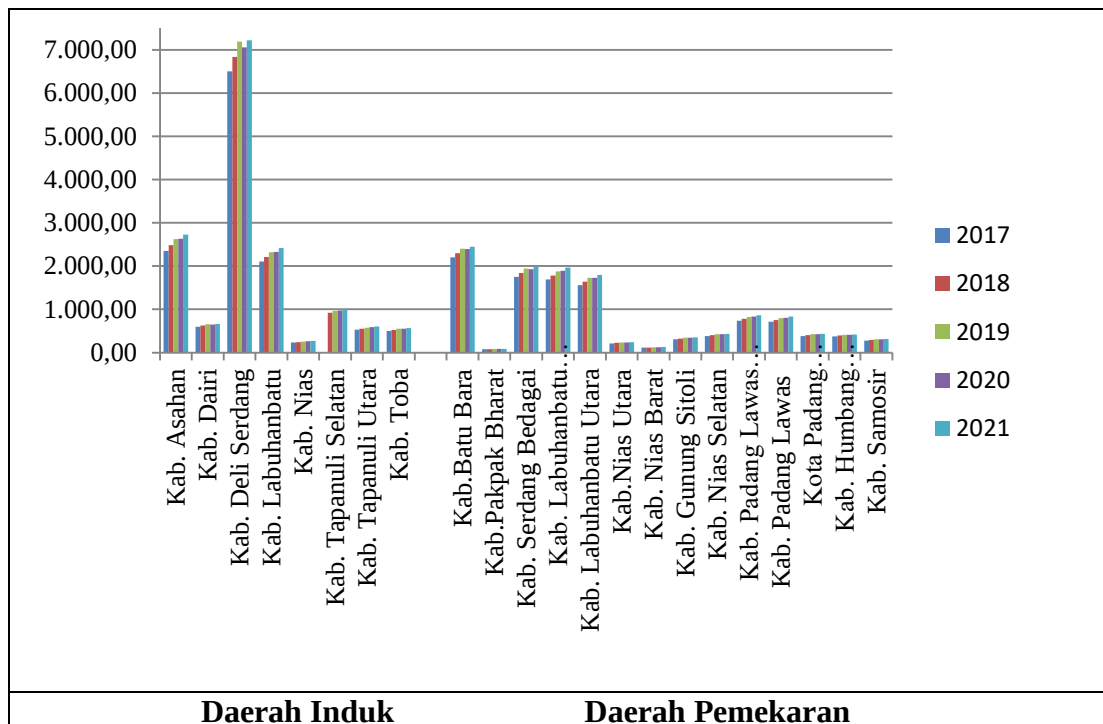
Sumber : Dirjen Otoda, Kemendagri 2021

Daerah induk	Nama Daerah Otonom Hasil Pemekaran	UU Pembentukan Daerah Otonom Hasil Pemekaran
Kabupaten Tapanuli selatan	Kabupaten Padang Lawas Utara	No. 37 tahun 2007
	Kabupaten Padang Lawas	No. 38 tahun 2007
	Kota Padang Sidempuan	No. 4 tahun 2001
Kabupaten Tapanuli utara	Kabupaten Humbang Hasundutan	No. 9 tahun 2003
Kabupaten Toba samosir	Kabupaten Samosir	No. 36 tahun 2003

Sumber : Dirjen Otoda, Kemendagri 2021

Kegiatan pemekaran wilayah-wilayah kabupaten ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Pembentukan DOB dilakukan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dalam kerangka pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sehingga dengan adanya pemekaran wilayah, aspek-aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi diharapkan akan menjadi lebih baik dan merata.

Indikator kemajuan suatu daerah dapat diukur, salah satunya dengan melihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Rinova et al.,2021). Tingkat kesejahteraan yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa selama periode tahun tersebut, PDRB daerah pemekaran lebih rendah dibandingkan daerah induk, artinya pemerintah daerah pemekaran belum berhasil dalam mempercepat laju pertumbuhan daerah serta belum mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.



Gambar 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

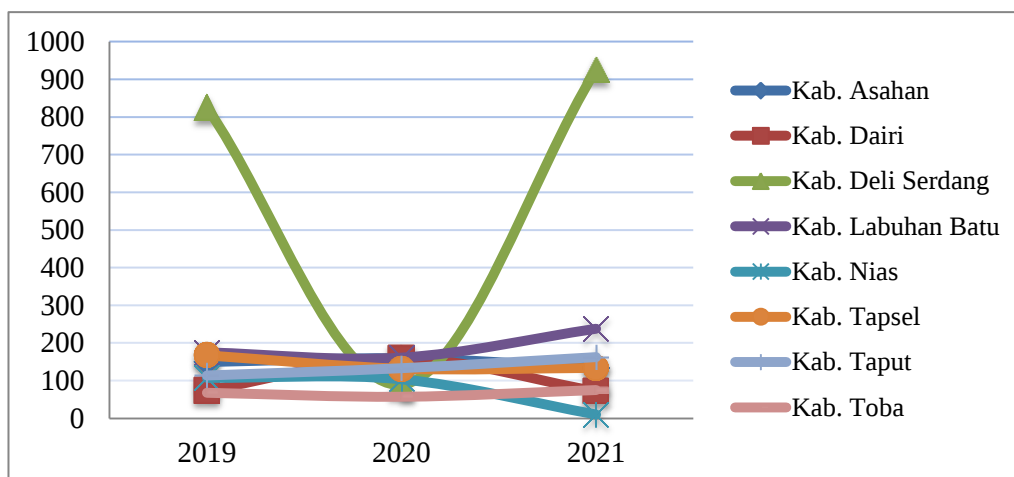
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Permasalahan bagi provinsi wilayah yang cukup luas, seperti Provinsi Sumatera Utara, menyebabkan timbulnya divergensi, yakni adanya perbedaan dan ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi antara daerah-daerah pada provinsi di Sumatera Utara. Ada dugaan penyebab dari divergensi ini adalah karena adanya perbedaan struktur industri atau sektor ekonominya. Menurut Ida (2005), pemekaran bukan jawaban utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan Fitriani *et al.*, (2005) menegaskan bahwa pemekaran membuka peluang untuk memperoleh keuntungan dari pemekaran wilayah.

Pemekaran daerah sesungguhnya juga menjadi tantangan bagi kinerja keuangan daerah induk, karena pemekaran daerah memunculkan potensi berkurangnya pendapatan asli daerah induk, karena sumber daya alam yang semula menjadi wilayahnya akan menjadi hak daerah baru, demikian juga dari pendapatan pajak dan

retribusi juga akan berkurang karena adanya sebagian warga yang beralih menjadi warga dari provinsi atau kabupaten baru.

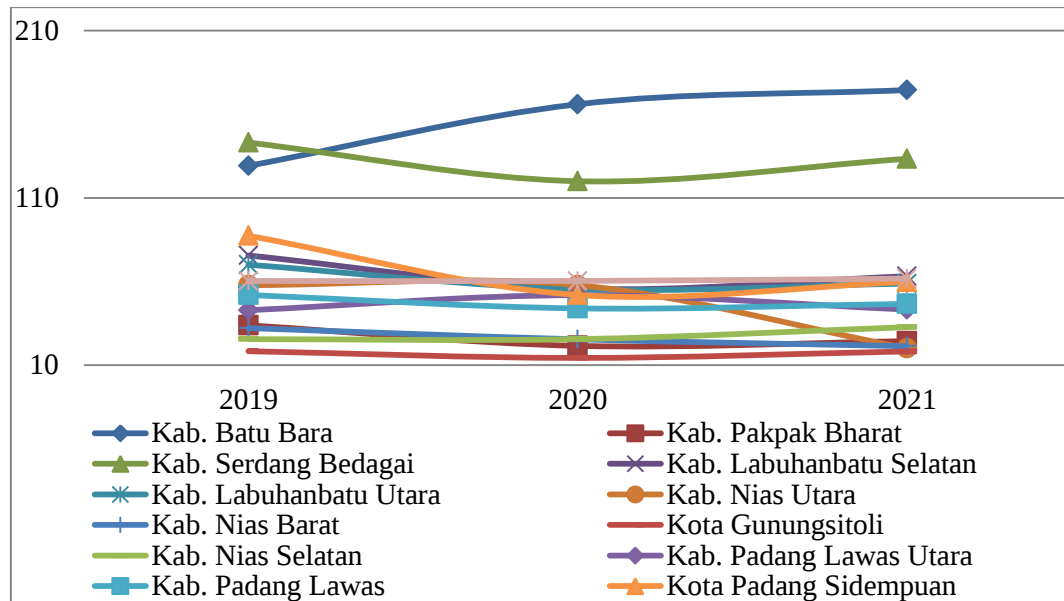
Melalui kinerja keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan perekonomian. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tujuan untuk mencapai tingkat kemandirian yang tinggi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD sendiri merupakan komponen yang penting dalam mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah.



Gambar1. 2 Realisasi PAD Daerah Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)
Sumber : Realisasi APBD Tahun 2019 -2021 , Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan

Pada gambar 1.1 perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada Kabupaten daerah induk di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2021 cenderung mengalami penurunan di tahun 2020. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa pada Kabupaten Asahan, perkembangan PAD di daerah tersebut cenderung stabil sejak tahun 2019 hingga 2021, sementara pada Kabupaten Dairi, PAD mengalami

peningkatan di tahun 2020. Namun, untuk Kabupaten induk lainnya, terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2020.



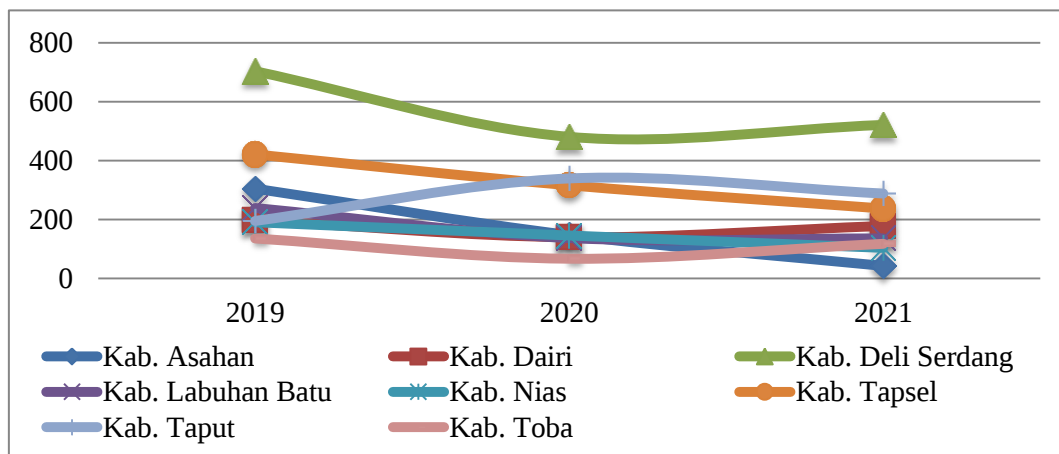
Gambar1. 3 Realisasi PAD Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2019 -2021 , Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan

Diperlihatkan pada gambar 1.2 perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/kota Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2021. Terdapat beberapa Kabupaten pada daerah pemekaran yang cenderung mengalami penurunan di tahun 2020. Selain itu, terlihat bahwa ada tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Batu Bara, Serdang Bedagai, dan Labuhanbatu Utara, yang mengalami peningkatan perkembangan PAD dari tahun 2019 hingga 2021.

Indikator kinerja keuangan daerah juga dinilai dari besarnya komponen belanja modal, Sularso (2011) menyatakan bahwa Alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur

dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan.

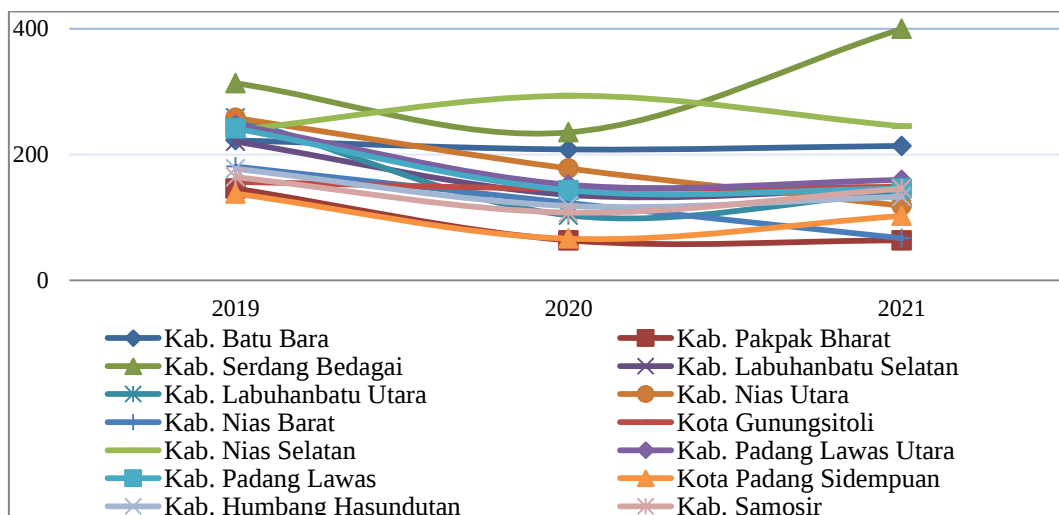


Gambar1. 4 Realisasi Belanja Modal Kabupaten Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2019 -2021 , Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan

Gambar 1.3 memperlihatkan perkembangan realisasi Belanja Modal

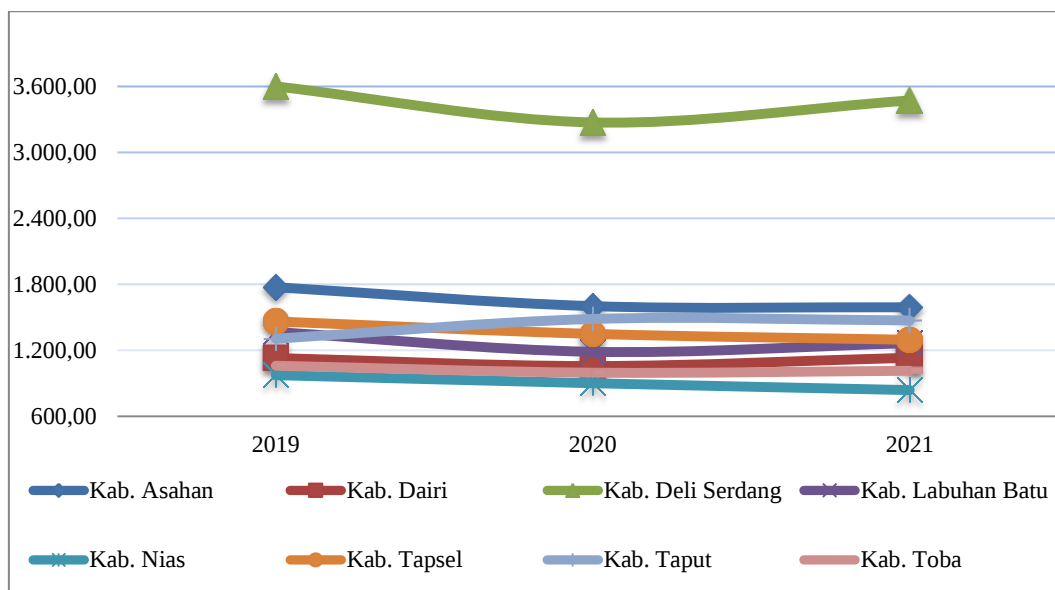
Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara yang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019-2021.



Gambar1. 5 Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2019 -2021 , Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan

Melihat perkembangan belanja modal pada daerah pemekaran diatas yang cenderung mengalami penurunan ditahun 2020, dan ditahun 2021 mengalami peningkatan kembali, salah satu kabupaten yang mengalami peningkatan terbesar belanja modal adalah pada Kabupaten Batu Bara, disusul dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Labuhan Batu Utara yang mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021. Sedangkan untuk kabupaten dengan perkembangan belanja modal terendah terdapat pada kabupaten Samosir.

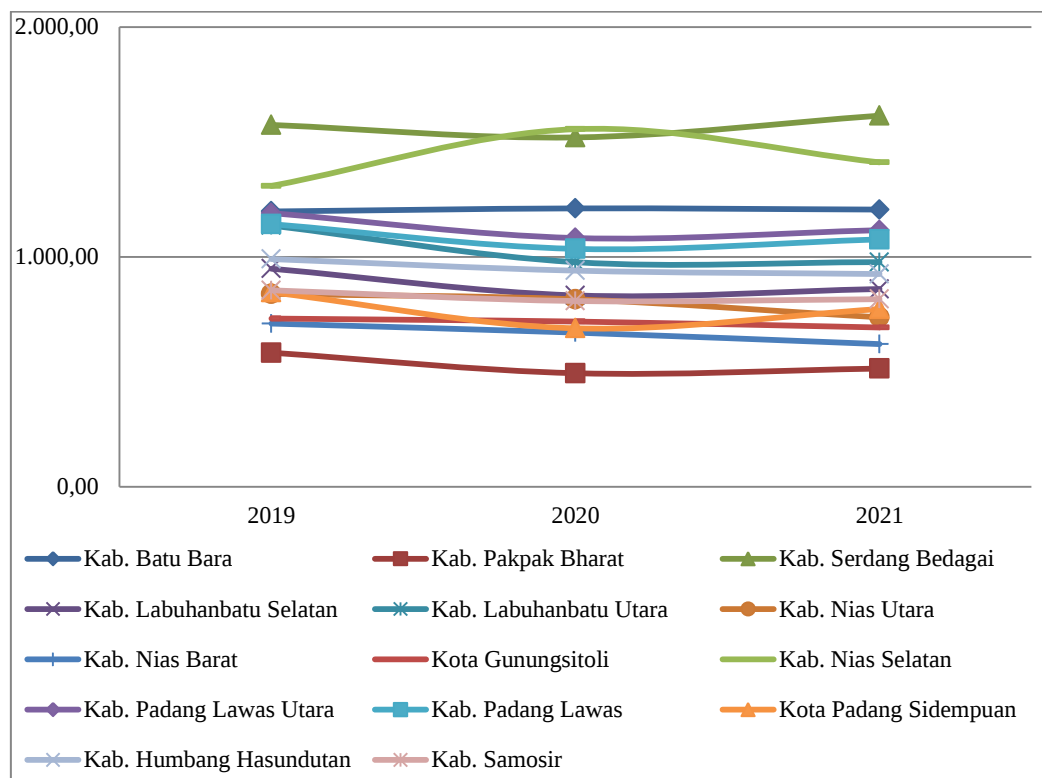


Gambar1. 6Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2019 -2021 , Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan

Perkembangan pendapatan transfer pada Kabupaten Induk di Provinsi Sumatera Utara pada gambar 1.5 diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten dengan pendapatan transfer tertinggi berada pada Kabupaten Asahan dan Kabupaten Dairi, sedangkan untuk kabupaten dengan perkembangan pendapatan transfer terendah terdapat pada Kabupaten Toba.

Untuk perkembangan pendapatan transfer pada daerah kabupaten/kota pemekaran terlihat cukup stabil. Pada gambar 1.6, kabupaten Batu Bara menjadi salah satu kabupaten dengan Perkembangan pendapatan tertinggi, disusul kabupaten Serdang Bedagai, Labuhan Batu Utara dan Nias Barat. Sedangkan untuk perkembangan pendapatan transfer terendah terdapat pada kabupaten Samosir dan Kota Padang Sidempuan.



Gambar1. 7 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2019 -2021 , Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan

Hasil ukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat digambarkan melalui perubahan-perubahan pada berbagai program yang telah dilaksanakan, seperti halnya pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Kinerja keuangan yang baik dalam suatu daerah dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. PDRB merupakan acuan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dalam

wilayah regional yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam sistem pengeluaran di sektor layanan publik (Arsa *et al.*,2015).

Hasil studi yang dilakukan oleh Bappenas dan UNDP (2008) terhadap 10 daerah induk dan 10 daerah pemekaran menunjukkan bahwa ada perbedaan kinerja keuangan daerah antara daerah induk dan daerah pemekaran. Kinerja yang diamati dalam penelitian ini adalah tingkat ketergantungan fiskal dan rasio belanja modal terhadap total belanja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal pemerintah daerah pemekaran lebih tinggi dari pada daerah induk. Akan tetapi rasio belanja modal terhadap total belanja di daerah induk justru lebih kecil dibandingkan daerah pemekaran. Bappenas menyatakan bahwa sampai saat ini masih sedikit studi yang mengkaji tentang kinerja dari pemerintah daerah pemekaran.

Kinerja keuangan daerah, baik daerah induk dan daerah otonomi baru atau daerah pemekaran menarik untuk diamati karena dalam era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sendiri keuangannya dan juga diberikan kewenangan untuk menggali sumber PAD. Berdasarkan penjelasan tentang kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah (pemda) antara daerah induk dan daerah otonomi pemekaran tersebut. Maka penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perbandingan kinerja antara kabupaten/kota induk dan pemekaran di provinsi Sumatera Utara serta melihat bagaimana hubungan kinerja keuangan daerah dengan produk domestik regional bruto, maka dari itu dilakukan penelitian ini dengan mengangkat judul “Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2021”.

1.2 Masalah dan pertanyaan penelitian

Berdasarkan permasalahan di latar belakang, disusun rumusan masalah yang dijadikan pada penelitian ini:

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan daerah antara daerah induk dan daerah pemekaran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021?
2. Bagaimana hubungan kinerja keuangan daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah induk dan daerah pemekaran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membandingkan kinerja keuangan daerah antara daerah induk dan daerah pemekaran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.
2. Untuk mengetahui hubungan kinerja keuangan daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah induk dan daerah pemekaran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam keterbaharuan ilmu pengetahuan dan pengembangan konsep-konsep yang telah ada, serta menyumbangkan wawasan untuk pihak lain yang nantinya akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya terkait bidang keuangan daerah dan kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efek pemekaran terhadap kinerja keuangan daerah dan bagaimana hubungan antara kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh PDRB. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di daerah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang efek pemekaran terhadap kinerja keuangan daerah, penelitian ini dapat membantu praktisi di pemerintahan daerah untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait alokasi sumber daya dan pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah membandingkan pengukuran kinerja keuangan daerah melalui Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Kemandirian keuangan daerah, dan Rasio Keserasian Belanja Modal dan melihat hubungannya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 8 Kabupaten daerah induk (Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba) dan 14 Kabupaten/kota daerah pemekaran (Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Gunung Sitoli, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Humbang Hasudutan, dan Kabupaten Samosir) di Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2012-2021.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Value For Money

Value For Money Theory merupakan suatu konsep pengelolaan pengukuran kinerja keuangan sektor public yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). *Value for moey* (VFM) adalah istilah yang digunakan untuk mengevaluasi pemerintah daerah apakah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (Mahmudi,2010).

Hal ini menandakan bahwa *Value for Money theory* sesuai ditetapkan untuk menilai atau mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku. Tujuan yang dikehendaki terkait pelaksanaan *Value for money* adalah:

1. Ekonomi : Hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya
2. Efisiensi : Berdaya guna dalam penggunaan sumber daya
3. Efektivitas: Mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan *Value for money* dalam pengukuran kinerja organisasi sector public sangat membantu suatu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh (Machmud et al., 2014) juga menyatakan bahwa kinerja merupakan pencapaian dari apa yang direncanakan, baik oleh individu maupun organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan rencana, maka kinerja dianggap baik. Jika

pencapaian melebihi dari yang direncanakan, maka kinerja dianggap sangat baik. Namun, sebaliknya, jika pencapaian tidak sesuai atau kurang dari rencana, maka kinerja dianggap buruk

Pendapatan asli daerah yang dikatakan sebagai kekayaan asli daerah dan harus terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah merupakan faktor penentu dalam kinerja keuangan daerah. Menurut Fahmi (2011), analisis Kinerja Keuangan dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah dilaksanakan dengan baik dan benar

2.1.3 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran belanja daerah selama satu tahun, ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, sesuai dengan (Mahsun, 2011). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Analisis Rasio Keuangan pada APBD.

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan pada APBD

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan ditunjukkan oleh rasio ini. Dalam penelitian ini, tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, sesuai dengan (Mahmudi,2010). Total penerimaan daerah mencakup semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah, baik yang murni berasal dari pendapatan asli daerah maupun dari penerimaan pembiayaan. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi akan semakin tinggi jika kontribusi pendapatan asli daerah juga semakin tinggi. Di bawah ini adalah rumus untuk menghitung derajat desentralisasi fiskal.

$$\text{Rasio derajat desentralisasi fiskal} = (\text{PAD}/\text{Total pendapatan daerah}) \times 100\%$$

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah

Persentase	Tingkat Desentralisasi Fiskal
00,00-25,00	Sangat Rendah
25,01-50,00	Rendah
50,01-75,00	Sedang
75,01-100	Tinggi

Sumber: Zesmi,K,M et al., dalam Mahmudi (2010)

b. Rasio Kemandirian Keuangan daerah

Dalam penelitian ini, Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian digunakan untuk menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal, terutama pemerintah pusat dan provinsi. Rasio kemandirian ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah = (Pendapatan Asli Daerah / Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman) x 100%

Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Ronald et al., dalam Halim (2004)

- a) Dalam pola hubungan instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b) Dalam pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
- c) Dalam pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi.
- d) Dalam pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

c. Rasio Keserasian Belanja

Rasio Keserasian menggambarkan prioritas alokasi dana oleh pemerintah daerah pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya. Semakin tinggi persentase Belanja Rutin, semakin rendah persentase Belanja Pembangunan yang digunakan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat (Halim et al.,2007). Terdapat dua perhitungan dalam

Rasio Keserasian: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Rasio Belanja Operasi adalah perbandingan total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah, yang menunjukkan porsi alokasi Belanja Operasi. Biasanya, proporsi Belanja Operasi dominan dalam total belanja daerah, sekitar 60-90%. Pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih besar daripada pemerintah daerah dengan pendapatan rendah (Mahmudi, 2016).

Rasio Belanja Modal adalah perbandingan total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Proporsi belanja modal dengan belanja daerah umumnya antara 5-20% (Mahmudi, 2016). Dalam negara berkembang, peran pemerintah daerah dalam memacu pembangunan masih signifikan. Oleh karena itu, rasio belanja modal perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pembangunan di daerah.

- **Rasio keserasian belanja= (total belanja langsung atau tidak langsung / total belanja daerah) x 100%**
- **Rasio keserasian belanja = (total belanja operasi atau belanja modal / total belanja daerah) x 100%**

d. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai apakah kinerja anggaran pemerintah daerah mengalami pertumbuhan positif atau negatif dalam satu atau beberapa periode anggaran (Mahmudi, 2016). Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran, potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian dapat dievaluasi (Halim et al.,2007)

Rasio Pertumbuhan PAD = (Realisasi penerimann PAD $X_n - X_{n-1}$ / Realisasi penerimaan PAD X_{N-1}) x 100 %

e. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REAPD)

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016). Untuk mengetahui REPAD dengan membandingkan Realisasi PAD dengan Anggaran PAD. Berikut rumus efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REAPD):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = (\text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Penerimaan PAD}) \times 100\%$$

Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah

Persentase	Tingkat Efektivitas
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Zesmi,K,M et al., dalam Mahmudi (2010)

f. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan

sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. (Halim et al.,2007).

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = (\text{Biaya pemungutan PAD} / \text{Penerimaan PAD}) \times 100\%$$

Tabel 2. 4 Kriteria Penilaian Efektivitas

Persentase	Tingkat Efisiensi
<10%	Sangat Efisien
10%-20%	Efisien
21%-30%	Cukup Efisien
31%-40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber: Zesmi,K,M et al., dalam Halim (2012)

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi, menurut (Subandi, 2011), didefinisikan sebagai peningkatan GDP/GNP tanpa memperhatikan apakah peningkatan tersebut melebihi pertumbuhan penduduk, adanya perubahan struktur ekonomi, atau sebaliknya.

PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dan dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang tercermin dalam PDRB yang tinggi, menunjukkan kemajuan perekonomian suatu daerah. PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (harga pada setiap tahun) atau harga konstan (harga pada tahun tertentu). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau nilai seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (2016), PDRB merupakan indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengindikasikan situasi perekonomian daerah setiap tahun. PDRB memiliki beberapa penggunaan, yaitu:

- a. PDRB harga berlaku menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan sumber daya ekonomi. kemampuan terhadap sumber daya keuangan yang tinggi dilihat dari tingginya PDRB.
- b. PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dari tahun ke tahun.
- c. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan atas nilai PDRB setiap anggota populasi.
- d. Menghitung PDRB per kapita atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Formula pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan yang digunakan yaitu :

$$\text{Pertumbuhan PDRB} = [(PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1}] \times 100\%$$

2.1.6 Konsep Pemekaran Wilayah

Mengkaji tentang pemekaran tidak lepas dari istilah keruangan. Tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Lokasi menggambarkan posisi pada ruang tersebut (dapat ditentukan bujur dan lintangnya). Studi tentang lokasi adalah melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berdekatan. Salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan gangguan ketika manusia berhubungan atau bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jarak menciptakan gangguan karena dibutuhkan waktu dan tenaga serta biaya untuk mencapai lokasi yang satu dari lokasi lainnya. Selain itu,

jarak juga menciptakan gangguan informasi sehingga semakin jauh dari suatu lokasi makin kurang diketahui potensi atau karakter yang terdapat pada lokasi tersebut. Menurut Agusniar (2006) Terciptanya wilayah administrasi baru secara logika harus dapat menciptakan hal sebagai berikut:

1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kewenangan lebih kepada masyarakat lokal untuk mengelolah potensi sumber daya wilayah
2. Partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat meningkat
3. Efisiensi, produktivitas serta pemeliharaan kelestariannya
4. Akumulasi dari nilai tambah secara lokal dan kesejahteraan masyarakat meningkat
5. Prinsip keadilan dan kesejahteraan yang berkeadilan lebih tercipta, sehingga ketahanan nasional semakin kuat

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

Penulis	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Zesmi, dkk (2018)	Untuk membandingkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi sebelum dan setelah pemekaran wilayah.	Deskriptif kuantitatif	Seluruh kabupaten tidak terdapat perbandingan pada kinerja keuangan diukur dengan rasio kemandirian daerah, desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi kabupaten antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah.
Ronald, dkk (2010)	Menganalisis dampak di berlakukannya Otonomi Daerah terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 1996-2008	Analisis Deskriptif	Rasio efisiensi belanja cenderung menurun, artinya Belanja Daerah cenderung efisien sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan
Putra, dkk (2020)	Menganalisis kinerja keuangan daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah pemekaran daerah di Sumatera Selatan	Deskriptif kuantitatif	Diukur dari rasio desentralisasi dan rasio keserasian terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan diukur dari rasio pertumbuhan PAD dan rasio ketergantungan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Lanjutan Tabel 2. 5

Penulis	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Machmud, dkk (2014)	Mengetahui kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012	Deskriptif kuantitatif	Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk rasio kemandirian termasuk dalam kriteria stabil, rasio efektivitas kurang stabil sedangkan untuk rasio kemandirian termasuk dalam kriteria kuang stabil.
Chude et al., (2013)	The objective of this study is to determine the effect of public expenditure on economic growth in Nigeria using Error Correction Model (ECM).	Ex-post facto research design	The results indicate that Total Expenditure Education is highly and statistically significant and have positive relationship on economic growth in Nigeria in the long run
Rohmadin, dkk (2019)	Menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara daerah induk dan daerah pemekaran	Deskriptif kuantitatif	Secara signifikan tingkat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah induk lebih baik dibandingkan dengan daerah pemekaran, sedangkan rasio belanja modal daerah pemekaran lebih baik dibandingkan daerah induk.
Tajuddin et al., (2020)	This study compares the financial performance of the newly created autonomous regions with the comparison of the financial performance of autonomous regions in the main regions of Southeast Sulawesi Province.	Descriptive Analysis	The results of the study show that Regional Financial Performance as measured by the ratio of KKD and DDF in the main districts is still higher than the KKD and DDF in the newly expanded regencies.
Chao et al., (2019)	This study investigates the impact of regional financial development on economic growth in the BTH region	The spatial econometrics approach	The research suggests that CREDIT positively affects regional economic growth,
Chude et al., (2013)	The objective of this study is to determine the effect of public expenditure on economic growth in Nigeria using Error Correction Model (ECM).	Ex-post facto research design	The results indicate that Total Expenditure Education is highly and statistically significant and have positive relationship on economic growth in Nigeria in the long run

Lanjutan Tabel 2. 5

Penulis	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Arif, dkk (2018)	Mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi belanja daerah dan keselarasan belanja pada alokasi belanja modal di 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2016	Analisis Deskriptif	Kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan efisiensi keuangan daerah dan keserasian belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

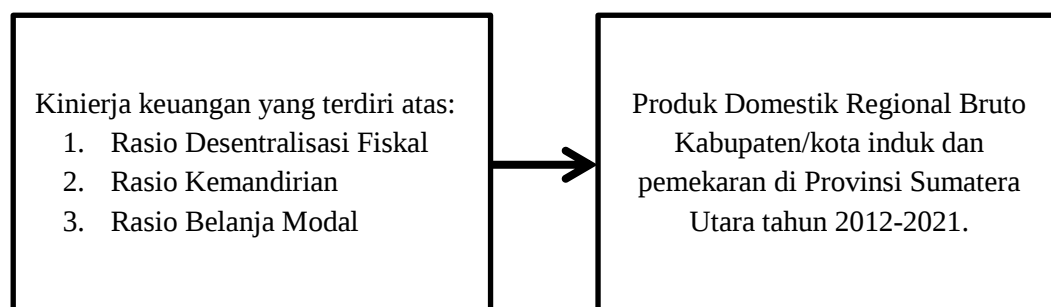
2.3 Pengembangan Hipotesis

Diduga terdapat hubungan positif antara kinerja keuangan daerah yang diukur melalui rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian dan rasio belanja modal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

2.4 Rerangka Penelitian

Untuk dapat mengukur perbandingan kinerja keuangan daerah antara daerah induk dan daerah pemekaran digunakan perhitungan rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian daerah, dan rasio keserasian belanja modal. Selanjutnya, dilakukan perbandingan serta melihat hubungannya dengan PDRB.

Adapun sistematika dari kerangka pemikiran terlihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Rerangka Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif, Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono,2017).

Dalam penelitian ini menggunakan alat perhitungan rasio untuk mengukur dan membandingkan kinerja keuangan daerah antara daerah induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 kemudian di analisis melalui tabel serta menggunakan alat SPSS 26 untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara kinerja keuangan daerah dengan PDRB di kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 melalui analisis korelasi rank spearman.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Adapun definisi operasional metode analisis data sebagai berikut:

1. Perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah proses membanding tingkat pencapaian dari hasil kerja dalam bidang keuangan daerah yang meliputi rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian dan rasio belanja modal pada kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.
2. Rasio desentralisasi fiskal merupakan ukuran seberapa besar pemerintah ikut campur dalam pembangunan daerah pada kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.
3. Rasio kemandirian adalah kemampuan dalam membiayai sendiri semua kegiatan pemerintah serta mencerminkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana

eksternal pada kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

4. Rasio keserasian belanja modal merupakan gambaran tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan eksternal dalam mengalokasikan belanja modal pada kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah PDRB atas Dasar Harga Konstan pada Kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 dengan satuan juta rupiah.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dua sumber utama, yaitu situs resmi Direktorat Jendral Keuangan yang menyediakan data Laporan Anggaran dan realisasi APBD setiap kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2012-2021, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara yang menyediakan data Produk Domestik Regional Bruto selama periode tahun 2012 hingga 2021.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, teknik ini akan menghasilkan data berupa laporan APBD baik anggaran maupun realisasi APBD. Sumber dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta laju pertumbuhan dari situs Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Pada Penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif untuk dapat menjawab permasalahan pertama, yaitu mendeskripsikan perbandingan kinerja keuangan daerah antara daerah induk dan daerah pemekaran. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka. Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (Putri, 2018).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah metode analisis data dengan menyajikan atau menggambarkan informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan tabel. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan dalam perhitungan rasio keuangan daerah adalah Excel, kemudian dianalisis melalui tabel.

3.4.1.1 Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

3.4.1.1.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Guna mengetahui Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) digunakan formula sebagai berikut:

- **Rasio derajat desentralisasi fiskal = $(PAD/Total\ pendapatan\ daerah) \times 100\%$**

Dari perhitungan rasio di atas dapat disimpulkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah

Persentase	Tingkat Desentralisasi Fiskal
00,00-25,00	Sangat Rendah
25,01-50,00	Rendah
50,01-75,00	Sedang
75,01-100	Tinggi

Sumber: Zesmi,K,M et al., dalam Mahmudi (2010)

3.4.1.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dipergunakan suatu rumus guna melihat tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

- **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah = (Pendapatan Asli Daerah / Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman) x 100 %**

Dari rumus rasio diatas dapat disimpulkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian Keuangan daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim dalam panjaitan (2018)

3.4.1.1.3 Rasio belanja modal

- **Rasio keserasian belanja= (total belanja langsung atau tidak langsung / total belanja daerah) x 100%**

Kriteria nilai rasio : Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara

5-20% (Mahmudi,2010)

Tabel 3. 3 Kriteria Penilaian Rasio Belanja Modal Keuangan Daerah

Presentase	Tingkat Kemampuan
0-5%	Sangat Rendah
5-10%	Rendah
10-15%	Cukup
>20%	Sangat Tinggi

Sumber: Mahmudi (2010)

3.4.1.1 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Indikator kinerja keuangan daerah melalui rasio keuangan desentralisasi fiskal, rasio kemandirian dan rasio belanja modal digunakan untuk melihat bagaimana keseluruhan kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021, rasio di klasifikasikan untuk melihat dan

mengetahui bagaimana nilai bobot diantara rasio keuangan daerah, sehingga dapat disimpulkan kriteria kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

Tabel 3. 4 Klasifikasi Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Desentralisasi Fiskal		Rasio Kemandirian		Rasio Kemandirian	
Nilai Kriteria	Bobot	Nilai Kriteria	Bobot	Nilai Kriteria	Bobot
00,00-25,00	1	0-25%	1	0-5%	4
25,01-50,00	2	25%-50%	2	5-10%	3
50,01-75,00	3	50%-75%	3	10-15%	2
75,01-100	4	75%-100%	4	>20%	1

Sumber: : Zesmi,K,M *et al* dalam Mahmudi (2010), Halim dalam Pandjaitan (2018) dan Mahmudi (2010)

Dalam klasifikasi indikator kinerja keuangan daerah melalui rasio keuangan daerah diatas maka dapat disimpulkan kriteria kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

Tabel 3. 5 Kriteria Kinerja Keuangan Daerah

Kriteria Kinerja	Bobot
Tidak Baik	1
Cukup	2
Baik	3
Sangat Baik	4

Keterangan

Sangat Baik : Semua Rasio Berbobot 4

Baik : 2 Rasio Berbobot 4

Cukup : 1 Rasio Berbobot 4

Tidak Baik : Semua Rasio Tidak Berbobot 4

3.4.2 Analisis Deskriptif Asosiatif

Pada Penelitian ini digunakan metode analisis asosiatif untuk dapat menjawab permasalahan kedua, bertujuan untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini melalui pendekatan penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2017) Penelitian asosiatif adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui antara dua variabel atau lebih. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka.

Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (Putri ,2018).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif asosiatif. Deskriptif asosiatif adalah metode analisis data menggambarkan dan menjelaskan hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih variabel dalam suatu kumpulan data. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah piranti SPSS 26.

3.4.1.2 Analisis Korelasi Pearson

Pada Penelitian ini digunakan metode analisis korelasi *Perason* untuk menjawab permasalahan kedua, yakni melihat hubungan kinerja keuangan daerah melalui rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian dan rasio belanja modal dengan PDRB atas dasar harga konstan daerah induk dan daerah pemekaran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 yang diolah menggunakan piranti SPSS 26. Uji korelasi *Perason* merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara rasio desentralisasi fiskal (X_1) terhadap PDRB atas dasar harga konstan (Y), rasio kemandirian (X_2) terhadap PDRB atas dasar harga konstan (Y) serta rasio belanja modal (X_3) terhadap PDRB atas dasar harga konstan (Y). Uji korelasi pearson digunakan apabila data yang didapat pada umumnya bersifat interval atau rasio.

Sehingga, uji korelasi *Pearson* dapat dirumuskan, sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n Y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n Y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n Y_i\right)^2}}$$

Keterangan :

r_s = Perason r correlation coefficient

N = Jumlah Sampel

Dasar pengambilan keputusan pada uji korelasi berdasarkan nilai signifikansi ;

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka berkorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0.05 maka tidak berkorelasi.

Adapun interpretasi tingkat keeratan hubungan antara variabel x dan y (variabel bebas dan terikat) menurut sugiyono (2017) sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0-0,2	Sangat Lemah
0,2-0,4	Lemah
0,4-0,7	Kuat
0,7- 0,9	Sangat Kuat
1	Sempurna

Sumber : Sugiyono (2017)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Analisis perbandingan Kinerja Keuangan Daerah antara Daerah Induk dan Daerah Pemekaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera utara dalam penelitian ini merupakan suatu proses penilaian terhadap tingkat pencapaian oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2021. Untuk melihat kinerja keuangan daerah diukur melalui Rasio Keuangan Daerah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mengukur pemanfaatan sumber daya lokal. Tingginya PAD memiliki implikasi signifikan, termasuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan, mengurangi ketergantungan pada transfer dana pusat, dan meningkatkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan keuangan untuk pembangunan dan layanan publik di daerah.

Berdasarkan data pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2021. Realisasi pendapatan asli daerah yang tertinggi yaitu pada Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2012-2021, Kabupaten Deli Serdang mengalami pendapatan asli daerah tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 926,1 (dalam miliar rupiah). Sedangkan Kabupaten dengan realisasi pendapatan asli daerah terendah dari tahun 2012-2021 terjadi pada Kabupaten Pakpak Bharat.

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
Kab. Asahan	37,8	53,6	91,4	98,2	52,1	123,6	142,9	149,6	159,3	134,86	104,33
Kab.Batu Bara	16,5	27,7	45,2	51,5	59,3	66,9	64,3	129,2	166	174,5	80,11
Kab. Dairi	2,9	29,9	53,5	58,7	68,0	128,4	729,6	74,3	159,3	72,2	145,42
Kab.Pakpak Bharat	6,3	9	15,3	15,8	18,7	29,3	20	33,9	21,6	24,4	19,43
Kab. Deli Serdang	291	328,3	433,8	515,2	573,0	849,2	729,6	825,3	89,7	926,1	554,24
Kab. Serdang Bedagai	39,2	50,3	74,7	80,1	108	103,7	194,3	143,1	120	133,4	104,68
Kab. Labuhanbatu	59,4	49,7	109,8	101	25,9	124,6	162,7	175,3	161,4	238,1	120,79
Kab. Labuhanbatu Sel	18,9	26,7	36,3	32,2	42,5	84,9	52,2	75,6	55,8	63,2	48,05
Kab. Labuhanbatu Utara	18,9	25,6	32,3	34,4	42,2	52,6	57	70,1	55,4	58,8	44,73
Kab. Nias	29,8	44,7	65	70,8	82,8	95,7	88,7	107,6	103,7	10,3	69,91
Kab.Nias Utara	7	8,8	10,9	16,9	23,8	20,1	50,3	57,9	57,9	20,1	29,43
Kota. Gunung Sitoli	9,3	10,3	19,1	24,3	29,1	29,7	29,4	32,2	25,5	21,4	23,03
Kab. Nias Barat	5,46	7,22	10,2	14,4	15,6	36,2	40,1	18,4	14,4	18,26	18,02
Kab. Nias Selatan	15,5	32	12,8	15	16,2	18,4	19,6	25,6	25,6	32,8	21,35
Kab. Tapanuli Selatan	56,1	69,2	95,5	109,3	76,6	104,7	140	167,4	132	134	108,48
Kab. Pdg.Lawas Utara	12,7	15,8	22,1	26,4	30,4	74,5	74,3	42,9	51,9	43,3	39,43
Kab. Pdg Lawas	9,8	23,1	28,7	34,7	39,3	46,5	47,4	52	44	46,7	37,22
Kota Padang Sidempuan	23,6	35	58,7	67,7	78,4	109,6	75	87,4	52	59,8	64,72
Kab. Tapanuli Utara	34	37,9	636	82,7	94,7	16,4	105,6	113,9	133,3	162,7	141,72
Kab. Humbang Hasundutan	17,9	17,6	29,4	35,2	42,0	85,5	92,7	73,7	67,9	26,9	25,02
Kab. Toba	16,5	19,8	26	30,9	54,3	54,8	52,2	68	57,4	75,3	45,52
Kab. Samosir	17,4	26,6	36,8	34,2	39,2	72,2	47,4	60,4	60,4	61,8	45,64

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2012-2021, Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan

4.1.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merujuk pada sumber pendapatan yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau daerah. Menurut Mahmudi (2010), komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain –lain pendapatan sah. Peningkatan pendapatan daerah memiliki dampak yang luas terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini memberikan pemerintah daerah sumber daya yang lebih besar untuk membiayai berbagai program dan kegiatan, dengan peningkatan pendapatan daerah, kemandirian keuangan yang lebih tinggi dapat diperoleh oleh pemerintah daerah. Daerah tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, tetapi juga memiliki sumber pendapatan internal yang signifikan, ini berarti daerah dapat lebih mandiri secara finansial dan tidak sepenuhnya tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah yang tinggi akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah dalam membiayai kegiatan pembangunan.

Berdasarkan data pada tabel 4.2 dapat diketahui Perkembangan Pendapatan Daerah antara daerah induk dan daerah pemekaran secara bertahap pada tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Realisasi pendapatan daerah tertinggi terdapat pada Kabupaten Deli Serdang (daerah induk), sepanjang tahun 2012-2021 mengalami peningkatan realisasi pendapatan daerah, kecuali di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.054,80 (dalam miliar rupiah). Sedangkan Kabupaten dengan realisasi pendapatan daerah terendah terdapat pada Kabupaten Nias barat (daerah pemekaran) dengan realisasi terendah di tahun 2012-2014.

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
Kab. Asahan	1.039,7	1.202,0	1.486,9	1.407,0	1.547,4	1.487,8	1.615,9	1.724,2	1.627,5	1.644,7	1.486,2
Kab.Batu Bara	653,1	786,1	878,5	918,9	1.092,6	1.063,5	1.053,2	1.192,7	1.179,6	1.168,6	998,6
Kab. Dairi	612,5	719,2	766,4	889,6	1.062,7	1.133,7	3.363,3	1.167,5	1.627,5	1.140,9	1.248,3
Kab.Pakpak Bharat	311	390,4	463,7	472,9	513,1	512,6	535,3	591	488,6	528,8	480,74
Kab. Deli Serdang	1.853,8	2.096,3	2.450,2	2.782,1	3.112,3	3.332,0	3.363,3	3.573,0	1.054,8	3.539,2	2.715,7
Kab. Serdang Bedagai	875,7	988	1.087,1	1.269,2	1.433,4	1.386,7	1.562,2	1.573,8	1.496,5	1.562,8	1.323,5
Kab. Labuhanbatu	764,4	827,4	860,3	1.013,0	1.277,2	1.164,2	1.221,1	1.318,7	1.177,7	1.342,1	1.096,6
Kab. Labuhanbatu Sel	506,1	618,9	681,1	729,7	883,1	869,1	888,4	971,7	861,7	939,4	794,9
Kab. Labuhanbatu Utara	671,5	755,1	776	854,7	980,1	1.050,2	1.033,3	1.082,4	968,3	1.038,9	921,0
Kab. Nias	419,4	463,1	515,8	691	818,4	870,8	901,8	964,4	891,8	884,7	742,1
Kab.Nias Utara	346,8	410,4	490,2	599,6	679,2	691,4	750,8	884,3	774,3	743,8	637,0
Kota. Gunung Sitoli	323,2	326,2	373,1	465,9	534,7	645,2	716	648,7	745,7	639,6	541,8
Kab. Nias Barat	437,5	452	510,6	622,7	706,2	691,4	702,8	730,7	703,7	709	626,6
Kab. Nias Selatan	538	626,5	643,1	814,8	1.008,8	1.126,5	1.165,0	1.311,1	1.459,7	1.401,1	1.009,4
	726	810,1	890,8	1.088,6	1.208,2	1.246,9	1.368,9	1.470,7	1.303,2	1.513,7	1.162,7
Kab. Tapanuli Selatan											
Kab. Pdg.Lawas Utara	484,8	539	590,6	717,5	997,5	1.023,8	1.029,4	1.134,4	1.036,7	1.065,3	861,9
Kab. Pdg Lawas	580,8	619,6	603,8	603,8	1.049,5	1.113,5	1.063,2	1.198,2	1.123,3	1.149,2	910,4
Kota Padang Sidempuan	540,4	625,7	704,9	772,4	817,1	892,6	808,6	885,4	1.134,4	779,3	796,0
Kab. Tapanuli Utara	725,6	852,2	873,1	1.117,1	1.197,8	1.221,1	1.290,5	1.333,0	1.290,8	1.418,0	1.131,9
Kab. Humbang Hasundutan	551,3	627,8	721,4	774,2	891,9	950,7	917,9	1.008,1	939,4	866,1	824,8
Kab. Toba	656	717,1	761,3	860,6	979,6	1.143,3	994,8	1.075,1	1.006,2	1.078,2	927,2
Kab. Samosir	1.039,7	1.202,0	1.486,9	1.407,0	1.547,4	1.487,8	1.615,9	1.724,2	1.627,5	1.644,7	1.486,2

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2012-2021, Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan

4.1.1.3 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merujuk pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau lembaga lain kepada pemerintah daerah. Transfer ini dapat berupa dana perimbangan, dana bagi hasil, atau bantuan keuangan lainnya. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah artinya semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya.

Sejalan dengan pendapat Mahmudi (2016) yang menyatakan bahwa semakin besar pendapatan transfer yang diterima daerah akan menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun. Pendapatan transfer yang meningkat menunjukkan kinerja pemerintah masih bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa perkembangan realisasi pendapatan transfer Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 mengalami fluktuasi. Realisasi pendapatan transfer tertinggi tahun 2012-2021 berada pada kabupaten Deli Serdang (Daerah Induk) tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan realisasi pendapatan transfernya sebesar 1.837,20 (dalam miliar rupiah). Realisasi pendapatan transfer terendah berada pada kabupaten Nias Barat (Daerah Pemekaran) di tahun 2012-2016, sedangkan realisasi terendah pada tahun 2017-2021 berada pada Kabupaten Pakpak Barat.

Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
Kab. Asahan	1.037,6	1.143,6	1.388,1	1.395,7	1.501,9	1.662,6	1.623,2	1.775,2	1.603,1	1.592,7	1.472,3
Kab.Batu Bara	641,9	760,7	791,5	903,3	1.128,4	1.065,8	996,4	1.197,8	1.211,1	1.206,0	990,29
Kab. Dairi	593,1	694,2	745,5	867,9	993,3	1.146,8	1.109,9	1.131,1	1.058,3	1.133,7	947,38
Kab.Pakpak Bharat	296,7	381,8	416,5	489,2	547,6	503,8	516	583,7	494,5	514,7	474,45
Kab. Deli Serdang	1.826,0	2.034,6	2.392,2	2.735,6	3.005,4	3.377,7	3.422,6	3.601,4	3.274,1	3.473,7	2.914,3
Kab. Ser. Bedagai	833,5	982,9	1.010,4	1.114,4	1.465,7	1.390,8	1.565,8	1.574,1	1.519,8	1.614,3	1.307,1
Kab. Labuhanbatu	760,5	827,1	915,1	1.019,7	1.194,3	1.259,7	1.150,3	1.367,5	1.187,8	1.266,1	1.094,8
Kab. L. Batu Selatan	442,7	720,3	664,8	770,5	864,2	900,4	870,9	948,9	832,8	860,7	787,6
Kab. L. Batu Utara	678,1	766,4	754,7	861,6	976,3	984,4	976,3	1.136,5	977,3	977,5	908,9
Kab. Nias	404	476,4	512,5	666,9	796,5	881,9	930,2	975,2	902	839,4	738,5
Kab.Nias Utara	335,3	442	446,6	615,6	701,3	72,8	745,7	839,4	815,7	737,3	630,9
Kab. Nias Barat	275,4	358,6	370,8	486,8	563	634,4	709,3	710,2	671,1	621,1	540,0
Kota. Gunung Sitoli	406,6	448,5	499,3	584,9	705,9	778	702,8	732,2	719,2	693,3	627,0
Kab. Nias Selatan	621,1	669	719	855,2	810	1.066,1	1.171,7	1.308,8	1.555,7	1.411,3	1.018,7
Kab. Tapanuli Selatan	676	842,8	862,2	1.119,1	1.176,8	1.196,2	1.315,2	1.463,7	1.350,7	1.297,1	1.129,9
Kab. Pdg. L. Utara	571,4	588,8	588,4	700,7	1.038,5	1.185,2	1.081,8	1.190,7	1.082,3	1.116,5	914,4
Kab. Pdg Lawas	439,8	504,1	512,1	785,8	967,3	1.033,3	1.067,0	1.142,7	1.035,2	1.076,5	856,3
Kota P. Sidempuan	527,2	614,8	670	795,6	854,9	833,8	821,6	846,2	689,7	773,5	742,7
Kab. Tapanuli Utara	737,7	834,3	816,5	1.097,1	1.251,1	1.203,5	1.293,9	1.306,7	1.486,3	1.473,2	1.150,0
Kab. H. Hasundutan	511,5	605,7	700,8	772,2	881,8	959,1	918,9	990,7	940,5	925,8	820,7
Kab. Toba	619,8	645,1	770,8	847,1	1.010,6	1.100,6	1.055,0	1.061,0	997,9	1.015,0	912,2
Kab. Samosir	415	522,2	572,9	683,5	810,3	864	803,8	855	808,4	816,4	715,1

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2012-2021, Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan

4.1.1.4 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka membiayai berbagai kegiatan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat lokal. Pratama *et al.*, (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas social, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan system jaminan social. Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Namun perlu dipahami belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah, tidak semua pengeluaran daerah yang dilakukan pemerintah daerah menyebabkan berkurangnya rekening kas umum daerah dikategorikan sebagai belanja. Setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah daerah meliputi pembiayaan dan belanja daerah. Sedangkan belanja daerah meliputi belanja operasi dan belanja modal serta transfer.

Tabel 4.4 menjelaskan tentang belanja daerah pada Kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2012-2021. Rata-rata belanja daerah tertinggi berada pada Kabupaten Deli Serdang sebesar 2.914,3 miliar rupiah dan belanja daerah terendah berada pada Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 474,45 miliar rupiah. Perkembangan belanja modal baik pada daerah induk dan daerah pemekaran mengalami fluktuasi selama periode 2012 sampai dengan 2021.

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
Kab. Asahan	1.037,60	1.143,60	1.388,10	1.395,70	1.501,90	1.662,60	1.623,20	1.775,20	1.603,10	1.592,70	1.472,37
Kab.Batu Bara	641,9	760,7	791,5	903,3	1.128,40	1.065,80	996,4	1.197,80	1.211,10	1.206,00	990,29
Kab. Dairi	593,1	694,2	745,5	867,9	993,3	1.146,80	1.109,90	1.131,10	1.058,30	1.133,70	947,38
Kab.Pakpak Bharat	296,7	381,8	416,5	489,2	547,6	503,8	516	583,7	494,5	514,7	474,45
Kab. Deli Serdang	1.826,00	2.034,60	2.392,20	2.735,60	3.005,40	3.377,70	3.422,60	3.601,40	3.274,10	3.473,70	2.914,33
Kab. Ser. Bedagai	833,5	982,9	1.010,40	1.114,40	1.465,70	1.390,80	1.565,80	1.574,10	1.519,80	1.614,30	1.307,17
Kab. Labuhanbatu	760,5	827,1	915,1	1.019,70	1.194,30	1.259,70	1.150,30	1.367,50	1.187,80	1.266,10	1.094,81
Kab. L. Batu Selatan	442,7	720,3	664,8	770,5	864,2	900,4	870,9	948,9	832,8	860,7	787,62
Kab. L. Batu Utara	678,1	766,4	754,7	861,6	976,3	984,4	976,3	1.136,50	977,3	977,5	908,91
Kab. Nias	404	476,4	512,5	666,9	796,5	881,9	930,2	975,2	902	839,4	738,50
Kab.Nias Utara	335,3	442	446,6	615,6	701,3	72,8	745,7	839,4	815,7	737,3	630,99
Kab. Nias Barat	275,4	358,6	370,8	486,8	563	634,4	709,3	710,2	671,1	621,1	540,07
Kota. Gunung Sitoli	406,6	448,5	499,3	584,9	705,9	778	702,8	732,2	719,2	693,3	627,07
Kab. Nias Selatan	621,1	669	719	855,2	810	1.066,10	1.171,70	1.308,80	1.555,70	1.411,30	1.018,79
Kab. Tapanuli Selatan	676	842,8	862,2	1.119,10	1.176,80	1.196,20	1.315,20	1.463,70	1.350,70	1.297,10	1.129,98
Kab. Pdg.L Utara	571,4	588,8	588,4	700,7	1.038,50	1.185,20	1.081,80	1.190,70	1.082,30	1.116,50	914,43
Kab. Pdg Lawas	439,8	504,1	512,1	785,8	967,3	1.033,30	1.067,00	1.142,70	1.035,20	1.076,50	856,38
Kota P. Sidempuan	527,2	614,8	670	795,6	854,9	833,8	821,6	846,2	689,7	773,5	742,73
Kab. Tapanuli Utara	737,7	834,3	816,5	1.097,10	1.251,10	1.203,50	1.293,90	1.306,70	1.486,30	1.473,20	1.150,03
Kab. H.Hasundutan	511,5	605,7	700,8	772,2	881,8	959,1	918,9	990,7	940,5	925,8	820,70
Kab. Toba	619,8	645,1	770,8	847,1	1.010,60	1.100,60	1.055,00	1.061,00	997,9	1.015,00	912,29
Kab. Samosir	415	522,2	572,9	683,5	810,3	864	803,8	855	808,4	816,4	715,15

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2012-2021, Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan

4.1.1.5 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dilakukan dengan tujuan memperoleh atau meningkatkan aset tetap atau modal produktif dalam rangka pembangunan infrastruktur fisik. Menurut (Bojanic, 2013) dan (Chude *et al.*, 2013), berpendapat bahwa dengan belanja modal, taraf hidup masyarakat yang tergolong dalam kalangan bawah dapat ditingkatkan. Produktivitas perekonomian, yang dalam hal ini adalah kinerja pemerintah daerah, akan meningkat seiring dengan peningkatan belanja modal (Darwanis dan Saputra, 2014). Peningkatan dana yang digunakan untuk belanja pemerintah tanpa peningkatan pendapatan yang seimbang dapat mengakibatkan defisit anggaran (Nwosu dan Okafor, 2014).

Pengalokasian belanja modal yang baik nantinya dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga menghasilkan pendapatan daerah. Dan hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan belanja daerah. Adapun selama periode tahun 2012-2021 perkembangan belanja modal antara daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara bisa dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini: Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui selama periode tahun 2012-2021 perkembangan belanja modal antara daerah induk dan daerah pemekaran mengalami fluktuasi. Realisasi belanja modal tertinggi tahun 2012-2021 berada pada Kabupaten Deli Serdang (Daerah Induk). Realisasi belanja modal terendah berada pada Kabupaten Pakpak Bharat (Daerah pemekaran) tahun 2017-2021.

Tabel 4.5 Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
Kab. Asahan	259,2	271,7	424,1	227,4	237,6	335,7	230,2	304,4	146,9	42,15	227,206
Kab.Batu Bara	168,7	205,2	210	227,9	320,4	249,9	139,9	222,6	208,2	213,8	216,66
Kab. Dairi	97,9	138,8	155,7	180	217,9	260,7	201,5	197,5	139,5	177,8	176,73
Kab.Pakpak Bharat	70,2	147,9	144,4	156,4	164,1	118,5	118,3	145,9	63,7	63,6	119,3
Kab. Deli Serdang	334,2	352,3	553,7	491,7	561,2	741,4	670,5	703	480,3	520,9	540,92
Kab. Ser. Bedagai	148,7	250,6	183,4	198,9	291,1	238,6	349	313,3	235,3	399,6	260,85
Kab. Labuhanbatu	204,1	226,6	209	185,5	285	277,9	139,1	238,7	136,6	135,6	203,81
Kab. L. Batu Selatan	145,2	335	244,9	262	294,6	273,1	219,3	220,5	136	146,6	227,72
Kab. L. Batu Utara	250	292,4	213,6	217,4	256,2	204,5	223	258,1	103,4	140,4	215,9
Kab. Nias	153,1	173,4	158	194,3	227,5	239,5	207	190,4	145,3	103,4	179,19
Kab.Nias Utara	107,3	184,3	141,6	219	233,7	251,6	192	258,2	177,9	118,7	188,43
Kab. Nias Barat	106,2	161	153,3	186,4	156,1	199,7	247,8	180,9	123	67,1	158,15
Kota. Gunung Sitoli	149,7	165,7	179,7	209,4	260,1	249,6	183,5	156,7	145,8	148,8	184,9
Kab. Nias Selatan	202,7	208,6	198,9	184,9	122,7	187,9	221,3	238,9	293,4	245,1	210,44
Kab. Tapanuli Selatan	194,1	267,4	222,3	303,9	307,1	277,2	363,1	420,6	315,9	236,9	290,85
Kab. Pdg.L Utara	232,9	193,4	171,9	170,6	228,4	312,5	196	247,4	152,1	159,5	206,47
Kab. Pdg Lawas	116,8	137,2	103,2	226,7	218,8	221,9	204,4	241,4	143,3	145,7	175,94
Kota P. Sidempuan	98,7	117,2	104	121,6	159,5	184	113	137,8	66,3	102,5	120,46
Kab. Tapanuli Utara	171,5	206,8	146,4	240,5	238,9	155,8	181,6	194,9	339,1	287,9	223,067
Kab. H.Hasundutan	124,4	190,8	223,9	196,2	223,6	224,7	168,8	177,2	118,4	132,9	178,09
Kab. Toba	153,9	125,5	156,1	154,1	181,2	199,2	152,9	135,3	66,5	117,1	144,18
Kab. Samosir	85,4	162,4	167,7	181,6	235,2	224,2	186,2	164	107,9	145,7	166,03

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2012-2021, Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan

4.1.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh masing-masing daerah bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang ada di daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bervariasi antar daerah. Dalam penelitian ini, digunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, PDRB Konstan digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan juga memberikan gambaran output yang lebih nyata dan tidak terpengaruh oleh perubahan harga. Adapun perkembangan PDRB atas dasar harga konstan antara daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui selama periode tahun 2012-2021 perkembangan PDRB atas dasar harga konstan antara daerah induk dan daerah pemekaran mengalami fluktuasi. Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB atas dasar harga konstan tertinggi tahun 2012-2021 berada pada kabupaten Deli Serdang (Daerah Induk). PDRB atas dasar harga konstan terendah di tahun 2012-2021 berada pada kabupaten Pakpak Barat (Daerah Pemekaran).

Tabel 4.6 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
Kab. Asahan	1.787,2	1.889,2	2.000,4	2.111,8	2.230,2	2.352,5	2.484,4	2.624,5	2.629,9	2.727,9	2283,8
Kab.Batu Bara	1.791,6	1.867,4	1.945,9	2.025,9	2.116,5	2.203,4	2.299,8	2.399,8	2.392,3	2.448,6	2149,1
Kab. Dairi	467,1	490,6	515,3	541,3	568,8	596,8	626,7	656,9	650,8	664,1	584,7
Kab.Pakpak Bharat	5,69	60,3	63,9	67,7	71,7	76	80,5	85,2	85	87,2	68,81
Kab. Deli Serdang	4.751,3	5.189,6	5.579,3	5.872,2	6.183,9	6.499,1	6.834,1	7.187,8	7.059,6	7.217,3	6237,4
Kab. Serdang Bedagai	1.355,8	1.434,50	1.508,0	1.584,1	1.665,6	1.751,6	1.842,1	1.939,3	1.930,8	1.986,3	1699,8
Kab. Labuhanbatu	1.628,9	1.726,3	1.816,4	1.907,9	2.004,6	2.104,8	2.211,2	2.323,2	2.325,2	2.414,7	2046,3
Kab. L. Batu Sel	1.302,4	1.381,2	1.454,7	1.529,4	1.608,8	1.690,7	1.779,7	1.875,0	1.889,9	1.962,0	1647,3
Kab. L. Batu Utara	1.197,8	1.272,9	1.341,0	1.410,9	1.484,3	1.560,2	1.641,3	1.725,9	1.730,6	1.796,9	1516,2
Kab. Nias	177,6	188,8	199,1	210	221,4	232,5	244	256,3	260,9	266,6	228,6
Kab.Nias Utara	164,5	175	184,7	194,8	204,3	213,4	222,8	233,2	236,9	241,7	207,1
Kab. Nias Barat	8,77	92,3	97	101,7	107,4	112,6	117,9	123,6	125,7	128,5	101,5
Kota. Gunung Sitoli	227,6	241,7	256,5	270,3	287,6	304,9	323,2	342,8	344,1	351,9	295,0
Kab. Nias Selatan	307,4.	321,7	335,6	350,6	365,9	382,6	401,8	422,1	424,6	433,2	382,0
Kab. Tapanuli Selatan	615	722,2	754,2	792,1	831,4	874,8,	920,1	968,3	972,1	1.003,6	842,1
Kab. Pdg.L Utara	553,1	587,1	622,8	659,8	699,1	737,8	779,1	822,8	832,2	859,3	715,3
Kab. Pdg Lawas	533,2	565,9	599,7	634,1	672,5	711	753,4	795,9	805,3	836,2	690,7
Kota P. Sidempuan	295,2	312,4	328,5	345,1	363,6	383	403,8	426,1	423	434,6	371,5
Kab. Tapanuli Utara	419,8	441,9	464,5	486,8	507	528	551	576,4	585,1	605,8	516,6
Kab. H.Hasundutan	294,8	308,5	324,9	341,9	357,7	375,6	394,6	414,1	413,5	421,9	364,7
Kab. Toba	398,5	417,8	435,5	455,3	476,7	500,1	524,9	550,3	548,8	564,9	487,2
Kab. Samosir	210,5	223,4	236,7	250,3	263,5	277,6	293,1	309,8	308	316,2	268,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

4.1.2 Hasil Perhitungan

4.1.2.1 Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021

4.1.2.1.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Sebagai alat ukur yang digunakan, perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal digunakan untuk mengetahui posisi tingkat kekuatan keuangan daerah otonom dengan menghitung proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Total Pendapatan daerah. Dengan demikian, daerah otonom yang memiliki tingkat rasio derajat desentralisasi fiskal yang tinggi dapat diakui karena mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya sebagai sumber pendapatan asli daerah yang optimal, baik melalui pemanfaatan sumber pendapatan lama maupun pengelolaan sumber pendapatan baru.

Begitu pula kewajiban pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah daerah harus berusaha untuk memastikan pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2012-2021 telah berupaya dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan arah yang positif meskipun peningkatan tersebut belum secara signifikan, maka dari itu dilakukan analisis menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) untuk mengetahui sejauhmana Kinerja Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara dari tabel 4.7 sebagai berikut:

Rasio derajat desentralisasi fiskal = $(\text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$

Tabel 4.7 Perbandingan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Persentase)

Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
Daerah Induk	6,76	6,95	9,7	9,16	11,64	12,54	11,16	9,79	9,79	11,86	9,93
Daerah Pemekaran	3,24	3,61	4,34	4,49	4,57	6,42	6,33	6,27	5,8	5,4	5,04
Rerata Keseluruhan	6,80%										

Sumber: Hasil Penelitian, (2023)

Tabel 4.7 menjelaskan perbandingan rasio derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021. Selama periode tersebut, daerah induk memiliki rerata rasio desentralisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pemekaran. Rata-rata keseluruhan daerah induk mencapai 9,93% sementara daerah pemekaran memiliki rata-rata keseluruhan 5,04%. Rerata keseluruhan rasio desentralisasi fiskal dari kedua jenis daerah adalah 6,80%. Sepanjang tahun 2012-2021, total rerata rasio desentralisasi fiskal setiap tahunnya pada 8 kabupaten daerah induk lebih besar jika dibandingkan daerah pemekaran, yang memiliki 12 kabupaten dan 2 kota. Di tahun 2017, daerah induk dan daerah pemekaran memiliki rerata rasio tertinggi sebesar 12,54% untuk daerah induk dan 6,42% untuk daerah pemekaran. Salah satu interpretasi dari perbedaan ini bahwa daerah induk sedikit lebih mampu menyelenggarakan desentralisasi dalam mengoptimalkan potensi dibandingkan dengan daerah pemekaran.

4.1.2.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Sejalan dalam penelitian Dwindara (2006), semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstren (terutama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Untuk rumus perhitungannya sebagai berikut :

Rasio kemandirian = (Pendapatan Asli Daerah / Transfer Pusat + Provinsi+ Pinjaman)
x 100%

Tabel 4.8 Perbandingan Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota Daerah induk dan daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 (Persentase)

Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
Daerah Induk	7,62	8,07	11,09	10,75	9,82	15,27	12,97	13,8	16,78	15,26	12,14
Daerah Pemekaran	3,1	4,04	4,96	4,99	4,98	7,73	7,18	7,57	7,33	6,15	5,80
Rerata Keseluruhan	8,20%										

Sumber:Hasil Penelitian, (2023)

Tabel 4.8 menjelaskan perbandingan rasio kemandirian Kabupaten/Kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021. Selama periode tersebut, daerah induk memiliki rerata rasio kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pemekaran. Rata-rata keseluruhan daerah induk mencapai 12,14% sementara daerah pemekaran memiliki rata-rata 5,80%. Rerata keseluruhan rasio desentralisasi fiskal dari kedua jenis daerah adalah 8,20%. Selama periode tersebut, total rerata rasio kemandirian setiap tahunnya pada 8 kabupaten daerah induk lebih besar jika dibandingkan daerah pemekaran, yang memiliki 12 kabupaten dan 2 kota.

4.1.2.1.3 Rasio Keserasian Belanja Modal

Belanja modal merupakan jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Belanja modal digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, rumah sakit dan pembangunan fisik lainnya, termasuk juga sarana dan prasarana pemerintah.

Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya, proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah 5-20%

(Mahmudi,2010). Rasio belanja modal digunakan untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberi layanan kepada masyarakat. Menurut Mahmudi 2010 Pemerintah daerah dengan pendapatan daerah yang rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang tinggi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Maka dari itu dilakukan analisis menggunakan rasio keserasian belanja modal untuk mengetahui sejauhmana kinerja daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara.

Rasio Belanja Modal = (Realisasi Belanja Modal / Total Belanja Daerah) x 100%

Tabel 4.9 Perbandingan Rasio Keserasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Daerah Induk dan Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021(Persentase)

Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
Daerah Induk	25,16	25,1	24,03	21,2	21,5	21,03	17,8	18,44	14,69	13,21	20,21
Daerah Pemekaran	29,17	33,74	29,09	27,57	26,17	25,04	21,82	21,47	15,37	16,09	24,55
Rerata Keseluruhan	22,90%										

Sumber: Hasil Penelitian, (2023)

Tabel 4.7 menjelaskan perbandingan rasio belanja modal di Kabupaten/Kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021. Sepanjang tahun 2012-2021, Selama rentang waktu 2012-2021, angka rerata per tahun di daerah pemekaran menggambarkan bahwa rasio belanja modalnya lebih besar dibandingkan dengan daerah induk. Pada tahun 2012, rasio belanja modal rata-rata di daerah pemekaran mencapai titik tertinggi sebesar 29,17%, sementara daerah induk hanya mencapai rerata belanja modal tertinggi sebesar 25,16%. Dapat diamati bahwa selama periode tersebut, daerah pemekaran memiliki rerata rasio belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan

daerah induk. Terlihat bahwa rerata keseluruhan rasio belanja modal di daerah pemekaran adalah 24,55%, sementara di daerah induk mencapai 20,21%

Hal Ini menunjukkan bahwasanya, belanja modal di daerah pemekaran memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan daerah induk. Pada daerah pemekaran, belanja modal difokuskan untuk membiayai pembangunan berbagai infrastruktur pemerintahan yang belum dimiliki seperti gedung perkantoran, alat transportasi, juga alat-alat perkantoran dan rumah tangga. Alokasi belanja modal ini dilakukan secara bertahap, paling tidak dalam jangka waktu 5 tahun pertama sejak awal dimekarkannya daerah tersebut. Sementara daerah induk yang telah memiliki kesiapan infrastruktur pemerintah sebelum pemekaran dapat memfokuskan perhatiannya pada investasi publik.

4.1.2.2 Kriteria Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota induk dan Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021

4.1.2.2.1 Kriteria Kinerja Desentralisasi Fiskal

Tabel 4.10 menjelaskan kriteria kinerja keuangan daerah pada daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012 hingga 2021. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kriteria kinerja keuangan daerah di Kabupaten/Kota induk dan pemekaran cenderung sangat rendah. Namun, terdapat beberapa pengecualian di beberapa daerah induk seperti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Tapanuli Selatan yang menunjukkan kriteria kinerja keuangan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah pemekarannya, meskipun kriteria kinerja keuangan Kabupaten tersebut juga masih kurang.

Tabel 4. 10 Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/kota Induk dan Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Daerah Induk											
Kab. Asahan	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Kab. Dairi	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	SR	SR	SR	SR
Kab. Deli Serdang	R	R	R	R	R	R	S	S	SR	R	R
Kab. Labuhanbatu	SR	SR	R	SR	SR	R	R	R	R	R	R
Kab. Nias	SR	SR	R	SR	SR	R	R	R	R	R	R
Kab. Tapanuli Selatan	SR	SR	R	R	SR	SR	R	R	R	SR	R
Kab. Tapanuli Utara	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	SR	R	R	SR
Kab. Toba	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Rerata						SR					
Daerah Pemekaran											
Kab. Batu Bara	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	R	R	SR
Kab. Pakpak Bharat	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Kab. Serdang Bedagai	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	SR	SR	SR
Kab. L. Batu Selatan	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Kab. L. Batu Utara	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Kab. Nias Utara	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Kab. Nias Barat	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Kota. Gunung Sitoli	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Kab. Nias Selatan	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Kab. Pdg. L Utara	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Kab. Padang Lawas	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Kota Padang Sidempuan	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	SR	SR	SR	SR
Kab. Humb. Hasun	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	SR	SR	SR
Kab. Samosir	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Rerata						SR					
Rerata Keseluruhan						SR					

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

4.1.2.2.2. Kriteria Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4.11 menjelaskan kriteria kinerja keuangan daerah pada daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012 hingga 2021. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kriteria kinerja keuangan daerah di Kabupaten/kota induk dan pemekaran cenderung Instruktif artinya peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan peran pemerintah daerah. Namun, pada Kab. Deli Serdang (Daerah Induk) kriteria kinerja keuangan daerah cenderung konsultatif artinya daerah sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang.

Tabel 4.11 Kriteria RasioKemandirian Kabupaten/kota Induk dan Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Daerah Induk											
Kab. Asahan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. Dairi	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. Deli Serdang	I	I	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Kab. Labuhanbatu	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. Nias	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. Tapsel	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. Tapanuli Utara	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. Toba	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rerata						I					
Daerah Pemekaran											
Kab.Batu Bara	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab.Pakpak Bharat	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. Serdang Bedagai	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. L. Batu Selatan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. L. Batu Utara	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab.Nias Utara	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. Nias Barat	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kota. Gunung Sitoli	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. Nias Selatan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. Pdg. L Utara	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. Padang Lawas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kota Padang Sidempuan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. Humb.Hasun	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kab. Samosir	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rerata						I					
Rerata Keseluruhan						I					

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Keterangan

I =Instruktif

K = Konsultatif

4.1.2.2.2 Kriteria Kinerja Keserasian Belanja Modal

Tabel 4.12 menjelaskan kriteria kinerja keuangan daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012 hingga 2021. Dari data tersebut dapat disimpulkan bawah daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kriteria kinerja keuangan yang kurang baik dalam hal belanja modal. Hampir seluruh kabupaten daerah pemekaran memiliki kriteria sangat tinggi

Tabel 4.12 Kriteria Rasio Belanja Modal Kabupaten/kota Induk dan Pemekaran di

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Daerah Induk											
Kab. Asahan	ST	ST	ST	T	T	ST	ST	ST	R	R	T
Kab. Dairi	T	ST	ST	ST	ST	ST	T	T	T	T	T
Kab. Deli Serdang	T	T	ST	T	T	ST	T	T	S	S	T
Kab. Labuhanbatu	ST	ST	ST	T	ST	ST	S	T	S	S	T
Kab. Nias	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	T	S	ST
Kab. Tapanuli Selatan	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	ST
Kab. Tapanuli Utara	ST	ST	T	ST	T	S	S	S	ST	T	T
Kab. Toba	ST	T	ST	T	T	T	S	S	R	S	T
Rerata	ST										
Daerah Pemekaran											
Kab.Batu Bara	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	T	T	ST
Kab.Pakpak Bharat	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	S	S	ST
Kab. Serdang Bedagai	T	ST	T	T	T	T	ST	T	T	ST	T
Kab. L. Batu Selatan	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	T	ST
Kab. L. Batu Utara	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	S	S	ST
Kab.Nias Utara	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	ST
Kab. Nias Barat	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	ST
Kota. Gunung Sitoli	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Kab. Nias Selatan	ST	ST	ST	ST	T	T	T	T	T	T	ST
Kab. Pdg. L Utara	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	ST	S	S	ST
Kab. Padang Lawas	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	T	S	S	ST
Kota Padang Sidempuan	T	T	T	T	T	ST	S	T	R	S	T
Kab. Humb.Hasun	ST	ST	ST	ST	S	ST	T	T	S	S	ST
Kab. Samosir	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	T	ST
Rerata	ST										
Rerata Keseluruhan	ST										

Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Keterangan

ST : Sangat Tinggi

T : Tinggi

4.1.2.3 Kinerja Keuangan Daerah

Pada tabel 4.13 dapat dilihat informasi Kinerja Keuangan Daerah di Kabupten/Kota baik pada daerah Induk dan Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kinerja yang tidak baik selama periode 2012-2021. Hal itu dapat dilihat dari rasio desentralisasi fiskal sangat rendah, rasio kemandirian yang instruktif dan

rasio belanja modal yang sangat tinggi hampir pada Kabupaten/kota baik pada daerah induk dan pemekaran.

Tabel 4.13 Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara 2012-2021

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Daerah Induk											
Kab. Asahan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Dairi	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Deli Serdang	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Labuhanbatu	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Nias	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Tapanuli Selatan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Tapanuli Utara	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Toba	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Rerata							TB				
Daerah Pemekaran											
Kab. Batu Bara	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Pakpak Bharat	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Serdang Bedagai	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. L. Batu Selatan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. L. Batu Utara	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Nias Utara	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Nias Barat	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kota. Gunung Sitoli	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Nias Selatan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Pdg. L Utara	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Padang Lawas	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kota Padang Sidempuan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Humb. Hasun	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Kab. Samosir	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Rerata							TB				
Rerata Keseluruhan							TB				

Sumber : Hasil Penelitian, (2023)

Keterangan :

TB : Tidak Baik

4.1.2.4 Hasil Perhitungan Korelasi Pearson

Untuk melihat hubungan masing-masing komponen kinerja keuangan daerah yang diukur melalui rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian dan rasio belanja modal

dengan PDRB dipergunakan alat uji korelasi sederhana Pearson (*Product Coefficient of Correlation*) yang hasilnya sebagaimana termuat dibawah ini;

4.1.2.3.1 Korelasi antara Rasio Desentralisasi Fiskal dengan PDRB

1. Daerah Induk

Tabel 4.14 Korelasi Rasio Desentralisasi Fiskal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Daerah Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021

		Correlations	
		Rasio Desentralisasi Fiskal	PDRB
Rasio Desentralisasi Fiskal	Pearson Correlation	1	-.098
	Sig. (2-tailed)		.387
	N	80	80
PDRB	Pearson Correlation	-.098	1
	Sig. (2-tailed)	.387	
	N	80	80

Sumber: Hasil Penelitian, Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.14 hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji korelasi pearson, antara variabel rasio desentralisasi fiskal dengan produk domestik regional bruto pada daerah induk dapat dijelaskan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut mempunyai korelasi negatif, artinya semakin tinggi rasio desentralisasi fiskal tidak diikuti dengan peningkatan pada produk domestik regional bruto pada daerah induk. Besaran nilai *pearson correlation* yang didapatkan sebesar -0,098. Ini berarti antara rasio desentralisasi fiskal dengan produk domestik regional bruto memiliki hubungan yang sangat lemah dengan tingkat *Sig. (2-tailed)* sebesar 0.387 lebih besar daripada 0.05 yang artinya tidak ada hubungan signifikan, dengan tingkat kekuatan sangat lemah tidak searah antara rasio desentralisasi fiskal dengan produk

domestik regional bruto pada daerah induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

2. Daerah Pemekaran

Tabel 4.15 Korelasi Rasio Desentralisasi Fiskal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021

		Correlations	
		Rasio Desentralisasi Fiskal	PDRB
Rasio Desentralisasi Fiskal	Pearson Correlation	1	-.146
	Sig. (2-tailed)		.084
	N	140	140
PDRB	Pearson Correlation	-.146	1
	Sig. (2-tailed)	.084	
	N	140	140

Sumber: Hasil Penelitian, Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan pada tabel 4.15 diatas hasil analisis koefisiensi korelasi dari hasil pengujian yang dilakukan antara variabel rasio desentralisasi fiskal dengan produk domestik regional bruto pada daerah pemekaran menghasilkan nilai *Sig. (2-tailed)* $0.084 > 0,05$ maka antara variabel rasio desentralisasi fiskal dengan produk domestik regional bruto pada daerah pemekaran tidak berkorelasi. Selanjutnya nilai *pearson correlation* yang diperoleh adalah -0.146, artinya korelasi bernilai negatif dengan tingkat keeratan antara rasio desentralisasi fiskal dengan produk domestik regional bruto adalah sangat lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada hubungan signifikan, dengan tingkat kekuatan sangat lemah tidak searah antara rasio desentralisasi fiskal dengan produk domestik regional bruto pada daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

4.1.2.3.2 Korelasi antara Rasio Kemandirian dengan PDRB

1. Daerah Induk

Berdasarkan tabel 4.16 hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji korelasi pearson , antara variabel rasio kemandirian dengan produk domestik regional bruto pada daerah induk dapat dijelaskan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut mempunyai korelasi negatif, artinya semakin tinggi rasio kemandirian tidak diikuti dengan peningkatan pada produk domestik regional bruto pada daerah induk. Besaran *pearson correlation* yang diperoleh adalah sebesar -0,138. Ini berarti antara rasio kemandirian dengan produk domestik regional bruto memiliki hubungan yang sangat lemah dengan tingkat *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,224 lebih besar daripada 0.05 yang artinya tidak ada hubungan signifikan, dengan tingkat kekuatan yang sangat lemah dan tidak searah antara rasio kemandirian dengan produk domestik regional bruto pada daerah induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

Tabel 4.16 Korelasi Rasio Kemandirian dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Daerah Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021
Correlations

		Rasio Kemandirian	PDRB
Rasio Kemandirian	Pearson Correlation	1	-.138
	Sig. (2-tailed)		.224
	N	80	80
PDRB	Pearson Correlation	-.138	1
	Sig. (2-tailed)	.224	
	N	80	80

Sumber: Hasil Penelitian, Olahan Data SPSS 26

2. Daerah Pemakaran

Berdasarkan pada tabel 4.17 diatas hasil analisis koefisiensi korelasi dari hasil pengujian yang dilakukan antara variabel rasio kemandirian dengan produk domestik

regional bruto pada daerah pemekaran menghasilkan nilai *Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka antara variabel rasio kemandirian dengan produk domestik regional bruto pada daerah pemekaran tidak berkorelasi. Selanjutnya nilai *pearson correlation* yang diperoleh adalah -0,294, artinya korelasi bernilai negatif dengan tingkat keeratan antara rasio kemandirian dengan produk domestik regional bruto adalah sangat lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada hubungan signifikan, dengan tingkat kekuatan hubungan yang sangat lemah dan tidak searah antara rasio kemandirian dengan produk domestik regional bruto pada daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

Tabel 4.17 Korelasi Rasio Kemandirian dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021

Correlations		Rasio Kemandirian	PDRB
Rasio Kemandirian	Pearson Correlation	1	-.294
	Sig. (2-tailed)		.308
	N	14	14
PDRB	Pearson Correlation	-.294	1
	Sig. (2-tailed)	.308	
	N	14	14

Sumber: Hasil Penelitian, Olahan Data SPSS 26

4.1.2.3.1 Korelasi antara Rasio Belanja Modal dengan PDRB

1. Daerah Induk

Berdasarkan tabel 4.18 hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji korelasi pearson, antara variabel rasio belanja modal dengan produk domestik regional bruto pada daerah induk dapat dijelaskan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut mempunyai korelasi negatif, artinya semakin tinggi rasio belanja modal tidak diikuti dengan peningkatan pada produk domestik regional bruto pada daerah induk.

Besaran *pearson correlation* yang diperoleh adalah sebesar -0,098. Ini berarti antara rasio belanja modal dengan produk domestik regional bruto memiliki hubungan yang sangat lemah dengan tingkat *Sig. (2-tailed)* 0,387 lebih besar daripada 0.05 yang artinya tidak ada hubungan signifikan, dengan tingkat kekuatan sangat lemah dan tidak searah antara rasio belanja modal dengan produk domestik regional bruto pada daerah induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

Tabel 4.18 Korelasi Rasio Belanja Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Daerah Induk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021

Correlations		Rasio Belanja Modal	PDRB
Rasio Belanja Modal	Pearson Correlation	1	-.098
	Sig. (2-tailed)		.387
	N	80	80
PDRB	Pearson Correlation	-.098	1
	Sig. (2-tailed)	.387	
	N	80	80

Sumber: Hasil Penelitian, Olahan Data SPSS 26

2. Daerah Pemekaran

Berdasarkan pada tabel 4.19 diatas hasil analisis koefisiensi korelasi dari hasil pengujian yang dilakukan antara variabel rasio belanja modal dengan produk domestik regional bruto pada daerah pemekaran menghasilkan nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0.387 > 0,05 maka antara variabel rasio belanja modal dengan produk domestik regional bruto pada daerah pemekaran tidak berkorelasi. Selanjutnya nilai *pearson correlation* yang diperoleh adalah -0,146, artinya korelasi bernilai negatif dengan tingkat keeratan antara rasio belanja modal dengan produk domestik regional bruto adalah sangat lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada hubungan signifikan, dengan tingkat kekuatan sangat lemah dan tidak searah antara rasio belanja modal dengan produk

domestik regional bruto pada daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

Tabel 4.19 Rasio Belanja Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pada Daerah Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021
Correlations

		Rasio Belanja Modal	PDRB
Rasio Belanja Modal	Pearson Correlation	1	-.146
	Sig. (2-tailed)		.084
	N	140	140
PDRB	Pearson Correlation	-.146	1
	Sig. (2-tailed)	.084	
	N	140	140

Sumber: Hasil Penelitian, Olahan Data SPSS 26

4.1.2.5 Korelasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Produk Domestik Bruto (PDRB)

Tabel 4.20 Korelasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Produk Domestik Bruto (PDRB)

Kinerja	Induk	Pemekaran	Tingkat Hubungan
Rasio Desentralisasi Fiskal	-0,098	-0,146	Sangat Lemah
Rasio Kemandirian	-0,138	-0,294	Sangat Lemah
Rasio Belanja Modal	-0,098	-0,146	Sangat Lemah
Trend Memburuk			

Sumber: Hasil Penelitian

Tabel 4.20 menjelaskan korelasi kinerja keuangan daerah dengan PDRB pada daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021. Terlihat bahwa korelasi diantara keduanya menunjukkan tingkat kekuatan hubungan yang sangat lemah, diantara korelasi kinerja keuangan antara daerah induk dan daerah pemekaran, terlihat bahwa nilai korelasi pearson pada daerah induk menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan daerah pemekaran artinya korelasi hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan PDRB pada daerah induk memiliki korelasi yang lebih kuat dibandingkan daerah pemekaran.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

4.2.1.1 Analisis Rasio Keuangan Daerah

4.2.1.1.1 Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal

Secara keseluruhan daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara memiliki kemampuan atau kinerja keuangan yang sangat kurang atau belum cukup mampu dalam menyelenggarakan desentralisasi dalam mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing, daerah induk yang memiliki rerata DDF tertinggi adalah Kabupaten Deli Serdang dengan nilai proporsi PAD 19.09% dan yang terendah terdapat pada Kabupaten Toba dengan nilai proporsi PAD sebesar 4.43%. Sedangkan pada daerah pemekaran rerata DDF tertinggi terdapat pada Kota Padang Sidempuan dengan nilai proporsi PAD 8.03% dan yang terendah terdapat pada Kabupaten Pakpak Bharat dengan nilai proporsi PAD sebesar 3.89%, menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berada pada kategori instruktif. Dengan kemampuan berada di bawah 25%. Pemerintah daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2012-2021 telah berupaya dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan arah yang positif meskipun peningkatan tersebut belum secara signifikan, Jika dilihat pada rerata rasio desentralisasi fiskal rata-rata kabupaten pada daerah induk sedikit lebih mampu menyelenggarakan desentralisasi dibandingkan dengan daerah pemekaran. Terkecuali pada Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba, memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah pemekarannya.

Secara umum dapat dikatakan, optimalisasi sumber-sumber PAD di daerah pemekaran relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah induk. Sehingga dapat

dikatakan bahwa, wilayah pada daerah pemekaran memiliki potensi yang lebih rendah dari pada daerah pemekaran. Hal ini terlihat pada nilai PDRB daerah pemekaran sepuluh tahun terakhir ini, rata-rata masih berada dibawah daerah induk. Ini berarti dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan karena daerah masih belum mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya, juga karena masih rendah nya basis pajak/retribusi pada masing-masing daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian Bappenas & UNDP (2003) yang menyatakan bahwa secara umum optimalisasi pendapatan asli daerah otonomi baru atau daerah pemekaran lebih rendah dibandingkan dengan daerah induk. Hal ini disebabkan belum optimalisasinya pengelolaan sumber-sumber pendapatan mulai dari sistem relugasi, kelembagaan maupun sumber daya manusianya.

4.2.1.1.2 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan menggambarkan ketergantungan terhadap sumber dana ekstern (pemerintah pusat dan provinsi). Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer).

Pada rasio kemandirian di Kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021, kabupaten/kota pada daerah induk yang memiliki rerata rasio tertinggi adalah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki rerata rasio kemandirian sebesar 24,85%, sedangkan Kabupaten Asahan menjadi daerah yang memiliki rerata rasio kemandirian terendah sebesar 8,00%. Sementara itu pada daerah

pemekaran, Kabupaten Batu Bara memiliki rerata rasio kemandirian tertinggi yaitu 8.60%, sedangkan Kabupaten Nias Selatan memiliki rerata nilai rasio terendah sebesar 2.40% menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berada pada kategori rendah sekali dengan kemampuan berada di bawah 25%. Dari rasio tersebut dapat diketahui bahwa pola hubungan Pemerintah daerah induk dan pemekaran masih berpola instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara.

Dibandingkan antara daerah induk dan pemekaran, rerata keseluruhan nilai rasio kemandirian pada daerah induk sudah sedikit lebih mampu dalam mengelola sumber daya secara mandiri tetapi membutuhkan dukungan sumber daya eksternal untuk menjalankan aktivitas pemerintahannya, terkecuali pada Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba, memiliki rerata nilai rasio kemandirian lebih rendah dibandingkan daerah pemekarannya.

Dengan ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat dan penerimaan pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal, baik pemerintah daerah induk dan daerah pemekaran perlu meningkatkan penerimaan sumber daya dan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar dapat menyokong Pendapatan Asli Daerah agar kedepannya bisa tumbuh menjadi daerah yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan yang lebih meningkat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bappenans & UNDP (2003) yang menyatakan bahwa ketergantungan fiskal yang lebih tinggi pada daerah pemekaran

menunjukkan daerah pemekaran memiliki ketergantungan yang lebih besar pada sumber-sumber penerimaan eksternal di luar pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen sumber pendapatan asli daerah dibandingkan dengan daerah induk. Hal ini bisa dilihat dari porsi pendapatan asli daerah terhadap transfer pusat dan provinsi serta pinjaman.

4.2.1.1.3 Analisis Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal pemerintah terhadap Total Belanja (disebut juga indikator CAPEX atau *Capital Expenditure*) mengukur seberapa jauh kebijakan pemerintah dalam penganggaran yang berorientasi kepada manfaat jangka panjang atau investasi. Belanja modal digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, rumah sakit dan pembangunan fisik lainnya, termasuk juga sarana dan prasarana pemerintahan, baik kantor bupati maupun kantor unit kerja-unit kerja yang ada di daerah.

Sepanjang tahun 2012-2021, daerah induk yang memiliki rerata rasio belanja modal tertinggi adalah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nilai proporsi PAD 26.06% dan yang terendah terdapat pada Kabupaten Toba dengan nilai proporsi PAD sebesar 16.42%. Sedangkan pada daerah pemekaran rerata rasio belanja modal tertinggi terdapat pada Kabupaten Nias Barat dengan nilai proporsi PAD 31.19% dan yang terendah terdapat pada Kota Padang Sidempuan dengan nilai proporsi PAD sebesar 16.22%. porsi CAPEX di daerah pemekaran secara umum lebih besar atau sangat tinggi dibandingkan daerah induk. Kecuali pada Kab.Tapanuli Selatan dan Kab. Serdang Bedagai, daerah induk ini memiliki porsi *Capital Expenditure* yang lebih besar dibandingkan dengan daerah pemekarannya. Daerah pemekaran terlihat memiliki fokus kepada belanja yang sifatnya investasi daripada konsumtif.

Secara rinci belanja modal di daerah pemekaran memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan daerah induk. Pada daerah pemekaran, belanja modal difokuskan untuk membiayai pembangunan berbagai infrastruktur pemerintahan yang belum dimiliki seperti gedung perkantoran, alat transportasi, juga alat-alat perkantoran dan rumah tangga. Alokasi belanja modal ini dilakukan secara bertahap, paling tidak dalam jangka waktu 5 tahun pertama sejak awal dimekarkannya daerah tersebut. Sementara daerah induk yang telah memiliki kesiapan infrastruktur pemerintah sebelum pemekaran dapat memfokuskan perhatiannya pada investasi publik.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bappenas & UNDP (2003) yang menyatakan bahwa rasio belanja modal pada daerah pemekaran lebih besar dari pada daerah induk. Rasio belanja modal daerah pemekaran lebih besar dari pada daerah induk dikarenakan daerah pemekaran merupakan daerah relatif baru, sehingga perlu banyak menambah belanja investasi aset tetap sebagai sarana dan prasarana bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.

4.2.3 Analisis Kondisi Kinerja Keuangan Daerah Induk dan Pemekaran

Kinerja keuangan daerah secara keseluruhan pada Kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 berada pada kinerja yang tidak baik. Dilihat dari rata-rata rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian yang masih rendah, sedangkan untuk rata-rata rasio belanja modalnya menunjukkan rerata belanja modal yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah induk dan daerah pemekaran belum memaksimalkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Jika dibandingkan kinerja keuangan daerah antara daerah induk dan pemekaran, daerah induk menunjukkan rerata rasio kinerja yang lebih besar dibandingkan dengan

daerah pemekarannya. Artinya bahwa kinerja ekonomi daerah induk masih lebih baik dibandingkan daerah pemekaran. Namun ada juga daerah pemekaran memiliki kinerja keuangan yang lebih besar dibandingkan daerah induknya, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ferawati 2015) bahwa kinerja keuangan daerah induk di Provinsi Aceh lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan pada daerah pemekarannya.

Dari sisi ekonomi, penyebab ketertinggalan daerah DOB dari daerah induk adalah adanya keterbatasan sumber daya alam, juga keterbatasan sumber daya manusia (penduduk miskin cukup banyak), dan belum maksimalnya dukungan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui investasi publik (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2008). Masalah-masalah yang dihadapi pada aspek ekonomi cukup beragam dan belum kondusif dalam menggerakkan investasi, pola belanja aparatur, dan pembangunan yang belum sepenuhnya mendukung perekonomian lokal karena masalah tempat tinggal aparatur, pemilihan ibukota kabupaten yang belum dapat menciptakan pusat perekonomian di DOB, keterbatasan berbagai infrastruktur penunjang ekonomi maupun penunjang pusat fasilitas pemerintahan.

Secara umum kinerja keuangan daerah otonom baru (DOB) lebih rendah dibandingkan daerah induk. Selama sepuluh tahun terakhir kinerja keuangan DOB cenderung konstan, sementara kinerja keuangan daerah induk cenderung meningkat. DOB memiliki ketergantungan fiskal yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induk. Ketergantungan fiskal yang lebih tinggi di daerah pemekaran terutama DOB secara persisten berkaitan dengan besarnya alokasi belanja modal di daerah pemekaran. peran keuangan pemerintah pusat dalam pembangunan di daerah pemekaran masih

sangat besar. Pemekaran juga mendorong ketergantungan yang lebih besar di daerah pemekaran dibandingkan dengan daerah induk. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2008), Penelitian yang berlangsung di Kabupaten Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Kabupaten Sekadau (Kalimantan Barat), Kota Tomohon (Sulawesi Utara), Kabupaten Sumbawa Barat (NTB) dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), menunjukkan bahwa selama lima tahun kinerja keuangan DOB cenderung konstan, sementara kinerja keuangan daerah induk cenderung meningkat, dengan ketergantungan fiskal yang lebih tinggi pada daerah DOB dibandingkan daerah induk.

Peran keuangan daerah yang kurang memadai menyebabkan perekonomian yang kurang berkembang, yang pada gilirannya berdampak pada kurang optimalnya pendapatan daerah dalam mendorong kemandirian fiskal. Optimalisasi pendapatan dan kontribusi yang rendah, terlihat dengan adanya *vicious circle* antara keuangan pemerintah dan perekonomian daerah. Optimalisasi PAD harus mengacu kepada peningkatan peran pemerintah yang cukup besar dalam mendukung dan menciptakan aktivitas ekonomi sehingga mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, Pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan mendorong peningkatan PAD yang lebih besar lagi. Studi yang dilakukan oleh Bappenas (2005) menyebutkan bahwa basis pajak di DOB belum didasarkan pada perkembangan ekonomi daerah. Hal ini disebabkan belum optimalnya perangkat pengelolaan sumber-sumber pendapatan, mulai dari tatanan sistem, regulasi, kelembagaan, maupun individu. Ini pula yang menyebabkan terbatasnya objek-objek pajak di daerah.

Sebagai daerah baru, DOB memiliki fokus yang relatif lebih besar dibandingkan daerah induk dalam hal belanja-belanja yang bersifat investasi daripada konsumtif. Karena itu pula, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB juga lebih besar di DOB dibandingkan daerah induk. Hal ini ternyata disebabkan pemda DOB pada tahun-tahun awal memprioritaskan pembenahan kelembagaan, infrastruktur kelembagaan, personil dan keuangan daerahnya.

Kemampuan keuangan daerah ditunjukkan melalui kinerja keuangan daerah yang digunakan sebagai alat mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut agar membaik adalah dengan menggali potensi sumber daya yang harus di kembangkan supaya menjadi sumber pendapatan daerah dan akan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Seharusnya dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri.

4.2.4 Analisis Korelasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

4.2.4.1 Analisis Korelasi Rasio Desentralisasi Fiskal dengan Produk Domestik Regional Bruto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi rasio desentralisasi fiskal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada daerah induk dan daerah pemekaran di provinsi Sumatera Utara selama periode 2012-2021 memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat kekuatan hubungan yang sangat lemah, artinya bahwa peningkatan pada rasio desentralisasi fiskal tidak diikuti dengan peningkatan pada produk domestik regional bruto pada daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal tidak berkorelasi signifikan terhadap produk domestik regional bruto, derajat desentralisasi fiskal yang diukur dengan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah masih memiliki efek yang sangat kecil terhadap produk domestik regional bruto sehingga terjadinya peningkatan derajat desentralisasi fiskal tidak mampu mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Kekuatan hubungan yang berbeda yang terjadi baik pada daerah induk dan daerah pemekaran terhadap PDRB, disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan pengelolaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi daerah. Kesenjangan pendapatan antar daerah yang dilihat dari indikator desentralisasi pendapatan berdasarkan hasil penelitian ini tidak terlalu mempengaruhi PDRB. Hal ini berarti bahwa semakin besar perbedaan pendapatan daerah dengan daerah lainnya tidak memberikan efek yang signifikan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi faktor yang membuat aspek penerimaan daerah tidak terlalu berimbas pada PDRB. Dengan besarnya ketergantungan daerah terhadap sumber penerimaan dari pusat, menunjukkan masih lemahnya kewenangan pusat dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat masih memiliki andil yang besar dalam menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kondisi inilah yang membuat desentralisasi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Oates (2003) yang menemukan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat. World Bank (1997) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, bisa dikatakan semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian ini sejalan dengan (Ayu et al., 2020) yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, terutama pada pemerintahan dengan pendapatan yang terbatas.

4.2.4.2 Analisis Korelasi Rasio Kemandirian dengan Produk Domestik Regional Bruto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi rasio kemandirian keuangan daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada daerah induk dan daerah pemekaran di provinsi Sumatera Utara selama periode 2012-2021 memiliki hubungan yang negatif dengan kekuatan hubungan yang sangat lemah dengan Produk domestik regional bruto. Korelasi negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah, yang artinya kenaikan pada rasio kemandirian tidak diikuti dengan peningkatan PDRB di daerah induk dan pemekaran.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan baik pada daerah induk dan daerah pemekaran tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto dilihat dari nilai signifikansi $> 0,05$, kemandirian keuangan yang diukur dengan rasio PAD terhadap transfer pusat, transfer provinsi dan pinjaman masih memiliki efek yang sangat kecil terhadap produk domestik regional bruto, hal ini dapat dilihat dari besarnya ketergantungan terhadap bantuan eksternal (bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi). Sehingga terjadinya peningkatan kemandirian keuangan daerah tidak mampu mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara.

Menurut halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi desentralisasi fiskal adalah kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan. Kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah, semakin besar PAD, maka akan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap sumber-sumber penerimaan lain. Perbedaan kemampuan inilah yang menyebabkan perbedaan kekuatan hubungan antara kemandirian keuangan daerah dengan PDRB di Kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2012-2021. Namun demikian, otonomi daerah menimbulkan konsekuensi dalam hal kesenjangan antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin dalam arti kemampuan daerah untuk memperoleh sumber daya keuangan daerah, sehingga sebagian diantaranya masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil uji analisis korelasi Pearson, terlihat bahwa nilai korelasi Pearson pada daerah pemekaran jauh lebih tinggi daripada daerah induk. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah pemekaran memiliki tingkat kemandirian yang rendah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga rendah, serta tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi dibandingkan daerah induk. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Sriyana (2011) yang menyimpulkan bahwa sumber keuangan kota dan kabupaten yang berasal dari PAD masih relatif rendah menimbulkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah serta tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Deby et al.,(2023), rasio kemandirian keuangan daerah dengan PDRB, menunjukan bahwa kemandirian

keuangan daerah mempunyai korelasi signifikan yang positif sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Silvia et al., 2021) bahwa tingkat kemandirian memiliki hubungan yang negative dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro 2009–2018 dengan tidak memiliki hubungan yang signifikan.

4.2.4.3 Analisis Korelasi Rasio Belanja Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi rasio belanja modal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2012-2021 memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat keeratan hubungan yang sangat lemah pada daerah induk dan daerah pemekaran dengan Produk domestik regional bruto. Namun keeratan hubungan kedua variabel yang diteliti mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang linear dari keduanya, yang artinya terjadinya peningkatan belanja modal tidak diikuti dengan peningkatan produk domestik regional bruto pada kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun tahun 2012-2021.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rasio belanja modal tidak berkorelasi signifikan terhadap produk domestik regional bruto baik pada daerah induk maupun pada daerah pemekaran. Secara umum, rasio belanja modal menggambarkan proporsi atau presentase dari total belanja yang dialokasikan untuk investasi dalam infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan pembangunan lainnya. Jika terdapat hubungan yang negatif antara rasio belanja modal dengan PDRB, hal ini dapat mengindikasikan bahwa pengeluaran yang tinggi dalam belanja modal tidak secara

efektif atau efisien meningkatkan produksi atau pendapatan pada kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021.

Kekuatan hubungan yang berbeda yang terjadi baik pada daerah induk dan daerah pemekaran terhadap PDRB, disebabkan karena rendahnya porsi alokasi belanja modal dari pemerintah daerah, sehingga belum mampu sepenuhnya dalam mendorong perekonomian daerah baik pada daerah induk dan daerah pemekaran. Besar kecilnya PAD menentukan besar kecilnya belanja modal, sehingga Pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali sumber-sumber PAD yang jika ingin meningkatkan belanja publik dan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan belanja modal. Jadi pengeluaran belanja modal dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah yang dimiliki, meningkatnya belanja modal sebagai cermin meningkatnya PAD (Hariyadi et al., 2014). Hal ini menjadi satu indikasi belum efektifnya kebijakan keuangan pemerintah daerah, terutama daerah DOB atau pemekaran dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di daerahnya, baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat investasi.

Daerah otonomi baru atau daerah pemekaran memiliki persentase total belanja pemerintah terhadap PDRB yang lebih besar dibandingkan dengan daerah induk. Selisihnya relatif cukup lebar. Hal ini menggambarkan bahwa kontribusi keuangan daerah terhadap perekonomian relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah induk. Selain lebih terfokus untuk memenuhi kebutuhan komposisi aparatur dan pembangunan fasilitas pemerintahan, besarnya kontribusi keuangan pemerintah daerah terhadap perekonomian lebih disebabkan belum berkembangnya perekonomian DOB dibandingkan daerah induk. Namun demikian perlu dikemukakan pula bahwa peran sektor pemerintah yang relatif besar di DOB belum dapat mendorong sektor swasta

untuk turut menggerakkan perekonomian di daerah. Selain itu, jenis kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah DOB kurang optimal dalam mendorong pertumbuhan pusat-pusat perekonomian.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Fitriyanti et al. (2007), Muharni (2008) serta Muhammad et al., (2010) bahwa belanja modal tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap PDRB, serta penelitian yang sama dilakukan Hariyadi et al., (2014) bahwa belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak berhubungan signifikan terhadap PDRB.

4.2.5 Analisis Korelasi Kinerja Keuangan Daerah Induk dan Pemekaran dengan Produk Domestik Bruto (PDRB)

Korelasi kinerja keuangan daerah secara keseluruhan pada Kabupaten/kota induk dan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021 berada pada korelasi yang sangat lemah terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Jika dibandingkan korelasi kinerja keuangan yang diukur melalui rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian dan rasio belanja modal dengan PDRB antara daerah induk dan daerah pemekaran, nilai korelasi pearson pada daerah pemekaran lebih baik dibandingkan pada daerah induk, artinya daerah pemekaran memiliki hubungan dengan PDRB meskipun tingkat kekuatan diantara keduanya sangat lemah.

Kekuatan hubungan yang berbeda yang terjadi baik pada daerah induk dan daerah pemekaran terhadap PDRB, disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan pengelolaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi daerah, daerah induk memiliki hal ini juga disebabkan oleh rendahnya porsi alokasi belanja modal dari pemerintah daerah, sehingga belum mampu sepenuhnya dalam mendorong perekonomian daerah baik pada daerah induk dan daerah pemekaran.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan daerah, secara umum, hampir semua Kabupaten/kota daerah induk dan daerah pemekaran memiliki kinerja keuangan yang kurang baik.
 - a. Kinerja keuangan daerah yang diukur melalui rasio desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah otonom baru (DOB) lebih rendah dibandingkan daerah induk. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat kurang dalam pengoptimalisasi sumber-sumber PAD pada daerahnya.
 - b. Kinerja Keuangan daerah yang diukur melalui rasio kemandirian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah induk cenderung lebih baik dibandingkan dengan daerah pemekaran, meskipun kedua daerah tersebut berada pada taraf yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ini bisa dilihat pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dilihat dari besarnya transfer pusat.
 - c. Kinerja keuangan yang diukur melalui rasio belanja modal menunjukkan perbedaan antara daerah induk dan daerah pemekaran, Daerah pemekaran memiliki belanja modal yang lebih besar dibandingkan dengan daerah induk. Hal ini dikarenakan DOB atau daerah pemekaran merupakan daerah yang relatif baru sehingga belum mempunyai aset tetap sebanyak daerah induk. Sehingga daerah pemekaran mengalokasikan belanja modal lebih besar dibandingkan daerah induk.

2. Hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan PDRB yang diukur melalui rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian dan rasio belanja modal, berdasarkan hasil uji analisis korelasi *Pearson (Product Coefficient of Correlation)* menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan dengan arah hubungan negatif dengan tingkat kekuatan hubungan yang sangat lemah antara daerah induk dan daerah pemekaran yang diukur melalui rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, dan rasio belanja modal.

5.2 Saran

1. Dilihat dari rata-rata tingkat desentralisasi fiskal, dan tingkat kemandirian daerah induk dan daerah pemekaran yang masih ada di tingkat yang rendah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah induk dan daerah pemekaran belum memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD tanpa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi atau menghambat lalu lintas barang.
2. Selain itu, pemerintah khususnya pemerintah daerah induk dan daerah pemekaran perlu memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih optimal dan menggali sumber-sumber PAD lainnya. Dengan memaksimalkan pendapatan dari PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan keuangannya, yang pada gilirannya berpotensi memberikan dampak positif pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

5.1 Keterbatasan dan Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

5.1.1 Keterbatasan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal menjelaskan hubungan sebab-akibat antara kinerja keuangan daerah terhadap PDRB atas dasar harga konstan. Metode tersebut lebih fokus pada pengukuran hubungan statistik antar variabel dan tidak memberikan informasi yang cukup untuk memahami secara mendalam hubungan sebab-akibat di antara keduanya.

5.2.1 Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya perlu melakukan pengembangan metode yang lebih komprehensif guna memperjelas hubungan antara kinerja keuangan daerah terhadap PDRB atas dasar harga konstan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melibatkan metode analisis yang lebih mendalam dan kompleks, yang mampu mengungkapkan hubungan yang lebih kuat antara variabel-variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusniar, A. (2006). *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat*. (Tesis). PascaSarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Ahmad, A (2021). *Gubsu Setuju Pemekaran Sumut, DPRD Ingatkan Moratorium Belum Dicabut*, (Online) (<https://news.detik.com/berita/d-5481452/gubsu-setuju-pemekaran-sumut-dprd-ingatkan-moratorium-belum-dicabut>, diakses pada 30 Juli 2023).
- Arsa, Ketut, dan Nyoman,D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 sd 2013. *Jurnal Bulatin studi Ekonomi*. (<https://www.neliti.com/id/publications/44261/pengaruh-kinerja-keuangan-pada-alokasi-belanja-modal-dan-pertumbuhan-ekonomi-pem>, 21 Maret 2003)
- Ayu, a. L., rahayu, s., & junaidi, J. (2020). The effect of financial performance on economic growth with allocation of capital expenditures as intervening variable *Jurnal akuntansi dan keuangan universitas jambi*, 5(1), 31–44. (<https://online-journal.unja.ac.id/jaku>, 21 Maret 2023)
- Badan Perencana Pembangunan Nasional, (2003) Studi Evaluasi Pemekaran Daerah 2001-2005. In BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance) (<https://priyohari.files.wordpress.com/2009/07/studi-evaluasi-dampak-pemekaran-daerah.pdf>, 26 Maret 2023)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2008). Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007. In BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance). (<https://priyohari.files.wordpress.com/2009/07/studi-evaluasi-dampak-pemekaran-daerah.pdf>, 26 Maret 2023)
- BAPPENAS. (2005). Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan, Komite Penanggulangan Kemiskinan, Januari 2005.
- BAPPENAS, & UNDP. (2008). Study Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007. Jakarta : Building and Reinventing Desentralised Governance. (<https://priyohari.files.wordpress.com/2009/07/studi-evaluasi-dampak-pemekaran-daerah.pdf>, 28 Maret 2023)
- Bojanic, Antonio N. (2013).The Composition of Government Expenditure and Economic Growth in Bolivia. *Journal of Economic*, 50 (1): 83-105. (<https://www.scielo.cl/pdf/laje/v50n1/art03.pdf>, 1 April 2023)
- Chao, W., Xinyi,Z., Pezhman, G., Qian,L, M., K Lim, H. E. S. (2019). The impact of regional financial development on economic growth in Beijing–Tianjin–Hebei region: a spatial econometric analysis. *Published by Elsevier*, 0–27.

(<https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S0378437119301098>, 25 Juli 2023)

- Chude, Nkiru, P and Daniel, I.C. (2013). Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria. *International Journal of Business and Management Review*, 1 (4): 64-71. (<https://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Impact-of-Government-Expenditure-on-Economic-Growth-in-Nigeria..pdf>, 1 April 2023)
- Darwanis & Ryanda, S. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1 (2): 183-199. (<https://jurnal.usk.ac.id/JDAB/article/view/3628>, 3 Maret 2023)
- Daulay, a., yusuf, m., & maipita, i. (2021). Analysis of regional disparity among regencies/cities and the correlation with economic growth north sumatera in 2010-2019. *Proceedings of the international conference on strategic issues of economics, business and, education (icosiebe 2020)*, 163(icosiebe 2020), 45–50. (<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210220.009>, 25 Maret 2023)
- Deby,A., Sari, Liona,E,D.,Irawan. (2023). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi Analysis. *Jurnal Smart: Sosial Ekonomi Dan Kerakyatan*, 1(1), 47–62. (<https://jurnal.usk.ac.id/JDAB/article/view/3628>, 24 Juli 2023)
- Dwi,S, s.e, m. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan sebagai pemoderasi di kabupaten/kota sumatera utara. *Jurnal akuntansi bisnis dan publik*, 8(2), 54–68. (<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/237>, 26 Juni 2023)
- Fahmi, Irham. (2011). *Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta*. (<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=7536>, 15 April 2023)
- Ferawati (2015). *Analisis Perbandingan Kinerja Ekonomi Daerah Pemekaran dengan Daerah Induk di Aceh*. Disertasi Tidak Diterbitkan.Aceh.Program Pasca Sarjana Universitas Syahkuala. (https://etd.usk.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12048, 18 April 2023)
- Ferrazzi, Gabriele. (2007). International Experience in Teritorial Implication for Indonesia. Jakarta: USAID-DRDP (Online)
- Fitriani, Fitria, Hofma,B & Kai,K. (2005). "Unity in Diversity? The Creational New Local Government in a Decentralizing Indonesia. Bulletin of Inonesia Studies (https://www.researchgate.net/publication/24077068_Untity_in_Diversity_The_Creation_of_New_Local_Governmnets_in_a_Decentralizing_Indonesia, 26 Juni 2023)

- Fitriyanti, Ismi,R dan Pratolo,S. (2009). Pengaruh pendapatan asli daerah. Dalam Penelitian Keuangan Akuntansi Sektor Publik II. Badan Litbang Departemen Dalam Negeri.
- Halim, A,. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit: UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A, (2012), *Akuntansi Keuangan Daerah- Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta; Salemba Empat
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Hariyadi, E., & Yasa, I. (2014). Pengaruh PAD Terhadap PDRB Dan Belanja Modal Kabupaten/ Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(12), 586–593. (<https://media.neliti.com/media/publications/44497-ID-pengaruh-pad-terhadap-pdrb-dan-belanja-modal-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.pdf>, 26 Juli 2023)
- Ida, Laode. (2005). Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia, Media Indonesia, Jakarta, 22 Maret 2005 (Online)
- Machmud, m., kawung, g., & rompas, w. (2014). Analisis kinerja keuangan daerah di Provinsi sulawesi utara tahun 2007-2012. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 14(2), 1–13. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4181>, (14 Maret 2023)
- Mahmudi. (2010) *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta; STIE YKPN.
- Mahsun, (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta ; BPFE
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muhammad,N. Alfian,M., (2010). Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* (<https://rp2u.usk.ac.id/index.php/welcome/prosesCariPublikasi/604/197411112003121002/Muhammad%20Nasir%20dan%20Alfan%20Mufrody/4>, 26 Juli 2023)
- Muharni. (2008). Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Riau). Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Nurmalasari, r. (2014). Proses pelayanan pengalihan daerah (studi kasus dinas pendapatan kota mataram): *jurnal akuntansi dan pajak, universitas brawijaya*.

(<https://onsearch.id/Record/IOS1692.article-154>, 25 April 2023)

- Nwosu, Damian C., and Harrison O. Okafor. (2014). Government Revenue and Expenditure In Nigeria: A Disaggregated Analysis. *Asian Economic and Financial Review*, 4 (7): 877-892. (<https://archive.aessweb.com/index.php/5002/article/view/1220>, 6 Maret 2023)
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National tax journal*, 46(2), 237-243. (<https://econpapers.repec.org/RePEc:ntj:journal:v:46:y:1993:i:2:p:237-43>. 4 April 2023)
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (n.d.). Beranda [Homepage]. Sumatera Utara, Indonesia. Diakses pada 8 Mei 2023, dari <https://sumutprov.go.id/>
- Pratama, K. A.D., D.N.S. WErastuti, dan E.Sujana. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 3 (1), 1-12 (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/4986>, 12 Juni 2023)
- Priambodo, a. (2015). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurusan ekonomi pembangunan, fakultas ekonomi, universitas negeri semarang, indonesia*, 4(1), 1-9. (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/14795>, 15 Juni 2023)
- Pujianty, d., & wibowo, p. (2019). Geliat Provinsi Kalimantan Timur pasca pemekaran daerah (east kalimantan province stretching post regional expansion). *Jurnal riset pembangunan*, 1, 58-70. (<https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/213>, 22 Juni 2023)
- Purwanti, e., & noviyanti, e. (2022). Analisis kinerja keuangan daerah pemerintah kota salatiga tahun 2014-2018. *Among makarti*, 14(2), 1-12. (<https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.21330> Juni 2023)
- Puspitasari, N.L.P. Lindri., M., Pradana, A., N.L.G. E.S., (2015). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha*, 3 (1). (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/4721>, 1 Juli 2023)
- Putra, b. P., & hidayah, r. U. (2020). Kinerja keuangan daerah kabupaten / kota sebelum dan setelah pemekaran daerah sumatera selatan. *Journal of economic, bussines and accounting (costing)*, 4(1), 19-26. (<https://doi.org/10.31539/costing.v4i1.1319>, 1 Juli 2023)
- Putri, V. E. (2020). The Effect Of Regional Financial Performance On Economic Growth Of Provinces In Indonesia. *Journal Humanities and Social Sciences*, 2(2). (<http://journal.uty.ac.id/index.php/IJBHES/article/view/84>, 25 Januari

2023)

- Putu, n., sukma, g., bagus, i., & sedana, p. (2018). Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah fakultas ekonomi dan bisnis universitas udayana , bali-Indonesia negara adalah wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki suatu organisasi yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan negara . *E-jurnal manajemen unud*, 7(2), 1080–1110. (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/35806>, 19 Juni 2023)
- Riani, p., hasibuan, a., islam, u., & sumatera, n. (2023). Analisis kinerja keuangan kabupaten/kota pemekaran di sumatera utara. *Mes mangagement journal*, 2, 260–271.(<https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mesman/article/view/103>, 21 Juni 2023)
- Rinova, R., & Dewi, F. G. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Daerah Pemekaran di Pulau Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 1–17. <https://doi.org/10.23960/jak.v24i2.192>
- Rohmadin, S., Kusmana, D., & Batubara, Y. E. (2019). Analisis Penataan Daerah Di Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1–13. (<https://doi.org/10.33701/jt.v9i1.606>, 22 Juni 2023)
- Ronald, a., ekonomi, f., & janabadra, u. (2010). *Di kabupaten kulon progo*. I(1), 31–42.(<https://www.academia.edu/32900984>,15 Juni 2023)
- Sari, n. (2019). An analysis of comparison of regional budget management in. *Jurnal ekonomi dan kebijakan publik Indonesia*, 6, 68–85. (<https://jurnal.usk.ac.id/EKaPI/article/view/14259>, 8 Juni 2023)
- Saputra. Fegi. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Laporan Arus Kas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI*. Skripsi Dipublikasikan.Padang, Universitas Negeri Padang
- Silvia, K., Dwi, A., Imanuel,A, A, M. W. (2021). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya. *Journal of Regional Economics Indonesia*.([https://eprints.uny.ac.id/14901/1/Skripsi%20Full_Denty%20Octavianin grum_10404244021.pdf](https://eprints.uny.ac.id/14901/1/Skripsi%20Full_Denty%20Octavianin%20grum_10404244021.pdf), 13 april 2023)
- Sirojuzilam dan Mahalli, K. (2010). *Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*.Medan; USU Press
- Sriyana, J. (2011). Disparitas Fiskal Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 56–66. (<https://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/205>, 27 Juli 2023)
- Subandi, (2011) .Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Pendidikan TerhadapPertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Kasus 5 Kabupaten/Kota.Universitas Negeri Yogyakarta (Skripsi). Universitas Negeri

Yogyakarta

(https://eprints.uny.ac.id/14901/1/Skripsi%20Full_Denty%20Octavianingrum_10404244021.pdf, 4 Juli 2023)

Sularso, havid dan Yanuar E.R. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntans.i* (https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/22, 16 Februari 2023)

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Tajuddin, i. (2020). Comparison the autonomic regional financial performance in southeast sulawesi province. *Economics development analysis journal*, 9(2), 180–189. (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/38288>, 17 April 2023)

Taufik. (2017). Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah kabupaten kota se-sumatera comparative analysis of government financial performance cities in sumatran. *Jurnal ilmiah gema ekonomi*, 7(1), 993–1012. (<https://ejurnal.stieprasetyamandiri.ac.id/index.php/gem/article/view/56>, 7 Juli 2023)

Todaro, P Michael. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

World Bank. (1997). *The World development Report*. New York.

Yulia, Astiti D.N., dan N.P. Sri,H,M.,(2016). Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (3): 1924-1950 (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/15809>, 28 Maret 2023)

Yuliana. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada kabupaten/kota di pulau sumatra). *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 5(1). (<https://www.neliti.com/publications/94311/pengaruh-pendapatan-asli-daerah-dan-belanja-modal-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-s>, 3 Juli 2023)

Wikipedia. (n.d.). Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia. Diakses pada 29 maret 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_dan_penggabungan_daerah_di_Indonesia

Zesmi,K,M., Y. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jambi Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah. *E-Jurnal Akuntansi Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi*27–39. (<https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/6026>. 10 Juni 2023)

LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fskal antara Daerah Induk dan Daerah Pemekaran

Daerah Induk	Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio DDF
Kabupaten Asahan	2012	37.894.587.647	1.039.734.135.562	3.64%
	2013	53.691.705.753	1.202.013.176.713	4.46%
	2014	91.468.218.559	1.486.997.911.062	6.15%
	2015	98.279.308.429	1.407.030.441.411	6.98%
	2016	52.170.348.430	1.547.406.244.269	3.37%
	2017	123.687.304.879	1.487.824.513.723	8.31%
	2018	142.972.039.821	1.615.917.027.263	8.84%
	2019	149.647.050.442	1.724.265.273.793	8.67%
	2020	159.308.333.492	1.627.537.561.826	9.78%
	2021	134.864.406.995	1.644.723.292.697	8.19%
Rata-rata				6.84%
Kabupaten Dairi	2012	20.911.510.364	612.556.975.415	3.41%
	2013	29.933.428.377	719.212.829.712	4.16%
	2014	53.525.854.131	766.415.851.556	6.98%
	2015	58.791.848.521	889.613.804.786	6.60%
	2016	68.003.241.760	1.062.706.591.682	6.39%
	2017	128.489.751.332	1.133.794.210.280	11.31%
	2018	729.648.594.489	3.363.304.583.386	21.69%
	2019	74.360.339.718	1.167.522.159.074	6.36%
	2020	89.758.997.873	1.054.826.116.417	8.50%
	2021	72.268.890.301	1.140.995.615.459	6.33%
Rata-rata				8.30%
Kabupaten Deli Serdang	2012	291.017.501.163	1.853.853.020.694	15.69%
	2013	328.348.147.362	2.096.336.073.545	15.66%
	2014	433.885.507.126	2.450.204.561.760	17.70%
	2015	515.293.681.488	2.782.141.454.678	18.52%
	2016	573.010.351.005	3.112.343.380.367	18.41%
	2017	849.286.151.151	3.332.039.840.502	25.48%
	2018	729.648.594.489	3.363.304.583.386	21.69%
	2019	825.375.281.297	3.573.056.389.619	23.09%
	2020	809.719.829.265	3.335.349.826.581	24.27%
	2021	926.137.759.153	3.539.280.627.629	26.16%
Rata-rata				19.09%
Kabupaten Labuhanbatu	2012	59.439.168.713	764.412.735.151	7.77%
	2013	49.784.550.240	827.442.717.848	6.01%
	2014	109.896.912.458	860.312.329.054	12.77%
	2015	101.023.216.259	1.013.045.067.461	9.97%
	2016	125.925.267.724	1.277.272.191.263	9.85%
	2017	124.674.017.375	1.164.296.889.256	10.70%
	2018	162.794.472.017	1.221.119.537.811	13.33%
	2019	175.335.685.317	1.318.715.109.321	13.29%
	2020	161.486.609.119	1.177.755.366.136	13.71%
	2021	238.194.215.394	1.342.106.703.519	17.74%
Rata-rata				11.51%
Kabupaten Nias	2012	29.821.669.770	419.400.137.481	7.11%
	2013	44.726.140.941	463.150.328.184	9.65%
	2014	65.082.210.841	515.836.195.878	12.61%
	2015	70.892.590.608	691.021.858.642	10.25%
	2016	82.840.434.009	818.455.989.242	10.12%
	2017	95.726.167.744	870.868.735.873	10.99%
	2018	88.754.606.115	901.833.538.569	9.84%

Daerah Induk	Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio DDF
Rata-rata Kabupaten Tapanuli selatan	2019	107.639.139.180	964.445.047.026	11.16%
	2020	103.755.392.882	891.842.456.150	11.63%
	2021	103.944.559.551	884.742.401.671	11.74%
				10.51%
	2012	56.160.143.106	726.028.773.533	7.73%
	2013	69.220.483.496	810.115.474.841	8.54%
	2014	95.588.202.103	890.870.434.274	10.72%
	2015	109.349.451.811	1.088.604.698.049	10.04%
	2016	76.640.675.841	1.208.268.811.128	6.34%
	2017	104.722.613.705	1.246.916.483.230	8.39%
Rata-rata Kabupaten Tapanuli utara	2018	140.044.217.234	1.368.913.574.362	10.23%
	2019	167.458.157.940	1.470.737.329.892	11.38%
	2020	132.010.127.162	1.303.242.398.140	10.12%
	2021	134.093.420.731	1.513.778.045.889	8.85%
				9.23%
	2012	34.023.120.253	725.670.398.177	4.68%
	2013	37.954.419.662	852.236.053.192	4.45%
	2014	63.696.097.399	873.193.145.521	7.29%
	2015	82.753.547.211	1.117.190.183.202	7.40%
	2016	94.783.154.638	1.197.874.974.979	7.91%
Kabupaten Toba samosir	2017	162.441.906.093	1.221.109.579.448	13.30%
	2018	105.656.762.964	1.290.537.707.622	8.18%
	2019	113.990.759.582	1.333.001.122.806	8.55%
	2020	133.375.094.966	1.290.868.909.825	10.33%
	2021	162.791.620.432	1.418.077.322.328	11.47%
	2012	16.542.682.536	656.081.813.809	2.52%
	2013	19.803.160.418	717.187.382.011	2.76%
Daerah Induk	Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio DDF
Rata-rata Rata-rata Keseluruhan	2014	26.014.430.212	761.300.762.642	3.41%
	2015	30.952.610.878	860.644.675.173	3.59%
	2016	54.391.304.393	979.614.336.729	5.52%
	2017	54.840.823.646	1.143.385.638.314	4.79%
	2018	52.298.960.803	994.826.109.404	5.25%
	2019	68.046.526.605	1.075.193.000.279	6.32%
	2020	57.403.162.933	1.006.299.214.620	5.70%
	2021	75.305.600.200	1.078.273.927.317	4.43%
				4.43%
			9.79%	

Daerah Pemekaran	Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio DDF
Kab. Batu Bara	2012	16.558.177.254	653.171.987.935	2.53%
	2013	27.761.999.043	786.106.744.470	3.53%
	2014	45.218.061.026	878.503.335.300	5.14%
	2015	51.514.120.899	918.903.852.066	5.60%
	2016	59.388.277.802	1.092.625.807.988	5.43%
	2017	66.944.796.375	1.063.564.070.217	6.29%
	2018	64.385.292.862	1.053.229.076.697	6.11%
	2019	129.221.846.897	1.192.716.072.756	10.83%
	2020	166.023.316.041	1.179.674.498.387	14.07%
	2021	174.549.720.181	1.168.634.296.934	14.93%

Daerah Pemekaran	Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio DDF
Rata rata				7.45%
Kab. Pakpak Bharat	2012	6.353.111.715	311.051.289.714	2.04%
	2013	9.080.676.937	390.450.182.777	2.32%
	2014	15.388.657.986	463.786.946.228	3.31%
	2015	15.880.335.074	472.997.018.285	3.35%
	2016	18.748.805.556	513.194.432.900	3.65%
	2017	29.320.487.447	512.671.276.741	5.71%
	2018	20.061.207.923	535.364.896.438	3.74%
	2019	33.915.957.645	591.094.321.315	5.73%
	2020	21.690.799.283	488.675.505.076	4.43%
	2021	24.443.194.479	528.849.791.417	4.62%
Rata rata				3.89%
Kab. Serdang Bedagai	2012	39.274.569.799	875.700.482.094	4.48%
	2013	50.371.732.820	988.058.956.318	5.09%
	2014	74.762.406.401	1.087.160.371.106	6.87%
	2015	80.141.929.203	1.269.299.011.032	6.31%
	2016	108.062.776.483	1.433.427.866.991	7.53%
	2017	103.711.290.229	1.386.778.177.706	7.47%
	2018	194.382.972.213	1.562.221.042.449	12.44%
	2019	143.144.170.557	1.573.886.868.156	9.09%
	2020	120.028.357.474	1.496.585.100.536	8.02%
	2021	133.466.455.515	1.562.895.800.646	8.53%
Rata-rata				7.58%
Kab. Labuhanbatu Selatan	2012	18.976.643.017	506.154.232.524	3.74%
	2013	26.701.972.211	618.909.256.456	4.31%
	2014	36.386.788.024	681.102.716.695	5.34%
	2015	32.287.183.165	729.737.181.478	4.42%
	2016	42.507.928.169	883.193.630.276	4.81%
	2017	84.964.450.592	869.128.797.800	9.77%
	2018	52.209.768.574	888.480.477.980	5.87%
	2019	75.687.647.545	971.732.667.267	7.78%
	2020	55.858.593.110	861.754.899.294	6.48%
	2021	63.254.710.984	939.476.497.742	6.73%
Rata-rata				5.92%
Kab. Labuhanbatu Utara	2012	18.971.116.519	671.575.211.350	2.82%
	2013	25.651.299.858	755.137.299.192	3.39%
	2014	32.398.504.352	776.036.583.661	4.17%
	2015	34.499.898.609	854.792.818.985	4.03%
	2016	42.296.115.862	980.169.601.534	4.31%
	2017	52.690.086.354	1.050.277.014.266	5.01%
	2018	57.010.690.546	1.033.343.832.204	5.51%
	2019	70.122.562.532	1.082.495.846.011	6.47%
	2020	55.494.095.702	968.329.052.089	5.73%
	2021	58.863.185.741	1.038.904.587.062	5.66%
Rata-rata				4.71%
Kab. Nias Utara	2012	7.008.910.631	346.814.355.460	2.02%
	2013	8.857.118.964	410.460.988.799	2.15%
	2014	10.961.907.851	490.265.502.133	2.23%
	2015	16.923.883.730	599.606.675.007	2.82%
	2016	23.852.634.632	679.245.602.734	3.51%
	2017	20.107.246.943	691.412.835.871	2.90%
	2018	50.395.504.636	750.868.856.695	6.71%

Daerah Pemekaran	Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio DDF
Rata-rata Kab. Nias Barat	2019	57.961.363.630	884.318.371.980	6.55%
	2020	57.961.363.630	774.315.084.653	6.55%
	2021	20.175.811.945	743.872.918.777	2.71%
				3.81%
	2012	5.460.766.343	323.241.015.472	1.68%
	2013	7.223.690.779	326.277.085.465	2.21%
	2014	10.298.057.732	373.104.473.255	2.76%
	2015	14.492.750.130	465.951.797.915	3.11%
	2016	15.616.742.531	534.737.998.610	2.92%
	2017	36.239.996.548	645.246.701.977	5.61%
Rata-rata Kota Gunungsitoli	2018	40.193.008.207	716.035.632.166	5.61%
	2019	18.411.235.998	745.755.858.934	2,46%
	2020	19.578.221.853	648.726.511.976	3.01%
	2021	18.267.918.507	639.622.037.728	2.85%
				3.22%
	2012	9.329.678.837	437.534.398.829	2.13%
	2013	10.382.482.094	452.039.058.759	2.29%
	2014	19.164.450.367	510.645.268.867	3.75%
	2015	24.334.650.845	622.748.088.670	3.90%
	2016	29.185.403.160	706.216.779.805	4.13%
Rata-rata Kabupaten Nias Selatan	2017	29.769.903.264	691.423.299.086	4.30%
	2018	29.456.354.563	702.840.277.059	4.19%
	2019	32.209.121.389	730.739.514.034	4.40%
	2020	25.530.252.953	703.793.539.789	3,62%
	2021	21.417.950.730	709.074.723.156	3.02%
				6.85%
	2012	15.592.080.807	538.096.541.840	2.89%
	2013	32.087.688.050	626.577.308.941	5.12%
	2014	12.828.005.886	643.149.408.775	1.99%
	2015	15.037.043.954	814.895.233.565	1.84%
Rata-rata Kab Padang Lawas Utara	2016	16.263.067.492	1.008.887.209.661	1.61%
	2017	18.450.266.700	1.126.563.468.536	1.63%
	2018	19.605.734.782	1.165.060.955.793	1.68%
	2019	25.664.883.761	1.311.187.399.570	1.95%
	2020	16.598.894.146	1.459.778.561.445	1,13%
	2021	32.822.654.372	1.401.145.247.615	2.34%
				2.22%
	2012	12.798.137.844	580.809.273.047	2.20%
	2013	15.804.225.377	619.663.792.859	2.55%
	2014	22.172.689.275	603.885.240.037	3.67%
Rata-rata Kab Padang Lawas	2015	26.446.077.261	603.885.240.037	4.37%
	2016	30.453.223.133	1.049.569.061.025	2.90%
	2017	74.524.919.693	1.113.578.885.254	6.69%
	2018	74.306.097.500	1.063.266.609.625	6.98%
	2019	42.929.111.658	1.198.289.989.291	4%
	2020	51.975.624.588	1.123.342.612.050	4.62%
	2021	43.312.600.311	1.149.206.581.378	3.76%
				4.13%
	2012	9.881.176.852	484.826.536.930	2.03%
	2013	23.140.067.442	539.014.374.665	4.29%
	2014	28.779.779.762	590.622.092.844	4.87%
	2015	34.707.409.094	717.553.001.820	4.83%
	2016	39.341.382.403	997.570.855.152	3.94%

Daerah Pemekaran	Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio DDF
	2017	46.509.729.525	1.023.852.818.104	4.54%
	2018	47.455.308.607	1.029.402.278.210	4.60%
	2019	52.067.312.091	1.134.441.839.325	4.58%
	2020	44.055.621.274	1.036.704.391.445	4.24%
	2021	46.759.858.387	1.065.364.286.682	4.38%
Rata-rata				4.23%
Kota Padang Sidempuan	2012	23.622.308.246	540.468.367.871	4.37%
	2013	35.018.175.219	625.778.532.486	5.59%
	2014	58.725.449.620	704.975.445.507	8.33%
	2015	67.730.738.638	772.413.223.572	8.76%
	2016	78.417.755.706	817.199.713.937	9.59%
	2017	109.640.419.281	892.662.506.143	12.28%

Lampiran 2: Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian antara Daerah Induk dan Daerah Pemekaran

Daerah Induk	Tahun	PAD	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	Rasio Kemandirian
Kabupaten Asahan	2012	37.894.587.647	890.981.018.124	4,25%
	2013	53.691.705.753	888.199.689.352	6,04%
	2014	91.468.218.559	1.389.864.557.448	6,58%
	2015	98.279.308.429	1.299.737.744.098	7,56%
	2016	52.170.348.430	1.467.720.777.364	3,55%
	2017	123.687.304.879	1.222.221.000.767	10,11%
	2018	142.972.039.821	1.367.467.898.258	10,45%
	2019	149.647.050.442	1.472.069.323.059	10,16%
	2020	159.308.333.492	1.361.012.302.565	11,70%
	2021	134.864.406.995	1.406.047.201.460	9,59%
Rata-rata				8,00%
Kabupaten Dairi	2012	20.911.510.364	598.556.296.714	3,49%
	2013	29.933.428.377	678.334.557.335	4,41%
	2014	53.525.854.131	707.094.466.600	7,56%
	2015	58.791.848.521	819.249.914.805	7,17%
	2016	68.003.241.760	975.997.543.461	6,96%
	2016	68.003.241.760	975.997.543.461	
	2017	128.489.751.332	878.446.058.448	14,62%
	2018	729.648.594.489	951.857.095.064	7,76%
	2019	74.360.339.718	1.028.117.439.372	7,23%
	2020	89.758.997.873	907.091.166.775	17,56%
	2021	72.268.890.301	1.004.252.574.615	7,19%
Rata-rata				15,28%
Kabupaten Deli Serdang	2012	291.017.501.163	1.480.966.190.214	19,65%
	2013	328.348.147.362	1.756.248.326.600	18,69%
	2014	433.885.507.126	2.007.514.826.334	21,61%
	2015	515.293.681.488	2.260.906.580.242	22,79%
	2016	573.010.351.005	2.534.152.554.362	22,61%
	2017	849.286.151.151	2.173.033.057.351	39,08%
	2018	729.648.594.489	2.426.123.806.464	37,07%
	2019	825.375.281.297	2.585.857.148.322	31,91%
	2020	809.719.829.265	2.049.562.028.316	39,50%
	2021	926.137.759.153	2.451.713.335.476	37,77%
Rata-rata				24,855

Daerah Induk	Tahun	PAD	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	Rasio Kemandirian
Kabupaten Labuhanbatu	2012	59.439.168.713	693.955.045.270	8,56%
	2013	49.784.550.240	716.233.421.608	6,95%
	2014	109.896.912.458	750.415.416.596	14,64%
	2015	101.023.216.259	824.647.507.013	12,25%
	2016	125.925.267.724	1.092.369.102.646	11,52%
	2017	124.674.017.375	976.982.703.731	12,76%
	2018	162.794.472.017	977.750.206.294	16,64%
	2019	175.335.685.317	1.012.228.495.149	17,32%
	2020	161.486.609.119	866.368.570.365	18,63%
	2021	238.194.215.394	1.025.181.922.700	23,23%
Rata-rata				14,25%
Kabupaten Nias	2012	29.821.669.770	380.532.069.928	7,83%
	2013	44.726.140.941	416.632.789.243	10,73%
	2014	65.082.210.841	450.003.985.037	14,46%
	2015	70.892.590.608	608.474.940.722	11,65%
	2016	82.840.434.009	731.238.309.555	11,32%
	2017	95.726.167.744	745.644.897.520	12,83%
	2018	88.754.606.115	774.136.159.356	11,46%
	2019	107.639.139.180	824.615.767.767	13,05%
	2020	103.755.392.882	568.165.947.668	18,26%
	2021	103.944.559.551	744.068.439.978	13,96%
Rata-rata				12,56%
Kabupaten Tapanuli Sel	2012	56.160.143.106	627.700.628.320	8,94%
	2013	69.220.483.496	740.894.991.345	9,34%
	2014	95.588.202.103	795.282.232.171	12,01%
	2015	109.349.451.811	889.893.684.361	12,28%
	2016	76.640.675.841	1.102.494.216.508	6,95%
	2017	104.722.613.705	926.340.632.677	11,30%
	2018	140.044.217.234	1.156.650.975.194	12,10%
	2019	167.458.157.940	1.225.763.003.890	13,66%
	2020	132.010.127.162	1.095.475.249.204	12,05%
	2021	134.093.420.731	1.308.861.528.415	10,24%
Rata-rata				10,89%
Kabupaten Tapanuli utara	2012	34.023.120.253	663.854.738.826	5,12%
	2013	37.954.419.662	761.663.073.336	4,98%
	2014	63.696.097.399	780.637.089.042	8,15%
	2015	82.753.547.211	1.017.005.208.446	8,13%
	2016	94.783.154.638	1.085.271.126.366	8,73%
	2017	162.441.906.093	1.055.355.673.355	15,39%
	2018	105.656.762.964	1.110.897.421.218	9,51%
	2019	113.990.759.582	1.134.513.257.921	10,04%
	2020	133.375.094.966	1.307.457.903.404	10,20%
	2021	162.791.620.432	1.320.679.556.544	12,32%
Rata-rata				9,26%
Kabupaten Toba samosir	2012	16.542.682.536	535.033.185.138	3,09%
	2013	19.803.160.418	570.644.961.880	3,47%
	2014	26.014.430.212	694.481.503.730	3,74%
	2015	30.952.610.878	746.636.303.395	4,14%
	2016	54.391.304.393	788.090.775.336	6,90%
	2017	54.840.823.646	900.313.417.268	6,09%
	2018	52.298.960.803	907.201.492.910	5,76%
	2019	68.046.526.605	970.147.351.276	7,01%
	2020	57.403.162.933	909.307.221.687	6,31%

Daerah Induk	Tahun	PAD	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	Rasio Kemandirian
	2021	75.305.600.200	967.354.006.117	7,78%
				5,43%
		Rata-rata Keseluruhan		12,46%

Daerah Pemekaran	Tahun	PAD	Total Daerah	Pendapatan	Rasio DDF
Kab. Batu Bara	2012	16.558.177.254	600.696.229.378		2,75%
	2013	27.761.999.043	670.090.443.427		4,14%
	2014	45.218.061.026	776.541.286.576		5,82%
	2015	51.514.120.899	851.367.923.461		6,05%
	2016	59.388.277.802	1.025.549.070.102		5,79%
	2017	66.944.796.375	944.170.513.270		7,09%
	2018	64.385.292.862	929.022.691.639		6,93%
	2019	129.221.846.897	994.632.022.418		12,99%
	2020	166.023.316.040,82	976.073.632.913		17,00%
	2021	174.549.720.181	997.604.592.218		17,49%
Rata rata					8,60%
Kab. Pakpak Bharat	2012	6.353.111.715	316.398.101.476		2,00%
	2013	9.080.676.937	365.030.211.162		2,48%
	2014	15.388.657.986	436.562.821.698		3,52%
	2015	15.880.335.074	445.867.508.495		2,56%
	2016	18.748.805.556	494.084.001.742		3,79%
	2017	29.320.487.447	483.302.932.690		6,06%
	2018	20.061.207.923	508.853.939.603		3,94%
	2019	33.915.957.645	491.216.832.029		6,90%
	2020	21.690.799.282,98	407.448.051.807		5,32%
	2021	24.443.194.479	490.218.863.352		4,98%
Rata rata					4,26%
Kab. Serdang Bedagai	2012	39.274.569.799	798.812.236.916		4,91%
	2013	50.371.732.820	864.334.630.550		5,82%
	2014	74.762.406.401	1.004.351.305.405		7,44%
	2015	80.141.929.203	1.113.523.306.029		7,19%
	2016	108.062.776.483	1.320.290.237.508		8,18%
	2017	103.711.290.229	1.272.260.728.549		8,15%
	2018	194.382.972.213	1.329.956.351.936		14,61%
	2019	143.144.170.557	1.165.714.395.599		12,27%
	2020	120.028.357.474,00	1.107.036.234.870		10,84%
	2021	133.466.455.515	1.456.544.381.814		9,16%
Rata-rata					8,86%
Kab Labuhanbatu Selatan	2012	18.976.643.017	490.935.236.678		3,86%
	2013	26.701.972.211	592.541.292.245		4,50%
	2014	36.386.788.024	629.206.863.671		5,78%
	2015	32.287.183.165	667.035.284.874		4,84%
	2016	42.507.928.169	831.754.816.052		5,11%
	2017	84.964.450.592	780.670.855.608		10,88%
	2018	52.209.768.574	792.098.778.406		6,59%
	2019	75.687.647.545	838.472.907.722		9,02%
	2020	55.858.593.110,00	755.548.026.184		7,39%
	2021	63.254.710.984	834.506.485.758		7,57%
Rata-rata					6,55%
Kab. Labuhanbatu Utara	2012	18.971.116.519	474.730.953.219		3,99%
	2013	25.651.299.858	592.091.413.409		4,33%

Daerah Pemekaran	Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio DDF
	2014	32.398.504.352	671.851.826.809	4,82%
	2015	34.499.898.609	768.196.023.052	4,49%
	2016	42.296.115.862	927.387.182.478	4,56%
	2017	52.690.086.354	882.018.582.895	5,97%
	2018	57.010.690.546	965.285.454.658	5,90%
	2019	70.122.562.532	886.440.434.348	7,91%
	2020	55.494.095.702,23	853.158.786.360	6,50%
	2021	58.863.185.741	931.499.911.672	6,31%
Rata-rata				5,48%
Kab. Nias Utara	2012	7.008.910.631	347.724.330.890	2,01%
	2013	8.857.118.964	383.237.411.835	2,31%
	2014	10.961.907.851	471.359.677.382	2,32%
	2015	16.923.883.730	510.936.574.032	3,31%
	2016	23.852.634.632	580.661.005.770	4,10%
	2017	20.107.246.943	573.237.838.100	3,50%
	2018	50.395.504.636	584.110.859.893	8,62%
	2019	57.961.363.630	814.166.362.591	7,11%
	2020	57.961.363.630	713.036.654.175	8,12%
	2021	20.175.811.945	692.601.268.923	2,91%
Rata-rata				4,43%
Kab. Nias Barat	2012	5.460.766.343	318.975.446.770	1,71%
	2013	7.223.690.779	315.287.973.187	2,29%
	2014	10.298.057.732	359.717.746.732	2,86%
	2015	14.492.750.130	403.037.313.563	3,59%
	2016	15.616.742.531	516.825.202.002	3,02%
	2017	36.239.996.548	608.528.656.605	5,95%
	2018	40.193.008.207	670.111.950.959	5,99%
	2019	18.411.235.998	691.670.037.556	2,66%
	2020	18.411.235.998	603.444.444.352	3,05%
	2021	18.267.918.507	598.199.716.038	3,05%
Rata-rata				3,42%
Kota Gunungsitoli	2012	9.329.678.837	425.469.612.478	2,19%
	2013	10.382.482.094	439.980.792.665	2,35%
	2014	19.164.450.367	491.480.818.500	3,89%
	2015	24.334.650.845	592.200.273.745	4,10%
	2016	29.185.403.160	674.483.577.325	4,32%
	2017	29.769.903.264	576.175.791.498	5,16%
	2018	29.456.354.563	647.734.332.996	4,54%
	2019	32.209.121.389	666.125.335.624	4,83%
	2020	25.530.252.953	563.459.655.681	4,53%
	2021	21.417.950.730	654.159.104.127	3,27%
Rata-rata				3,92%
Kabupaten Nias Selatan	2012	15.592.080.807	516.404.322.510	3,01%
	2013	32.087.688.050	594.489.620.891	5,39%
	2014	12.828.005.886	630.321.402.889	2,03%
	2015	15.037.043.954	789.997.893.786	1,90%
	2016	16.263.067.492	991.905.342.169	1,63%
	2017	18.450.266.700	1.107.567.816.464	1,66%
	2018	19.605.734.782	1.077.589.447.956	1,81%
	2019	25.664.883.761	1.220.220.680.167	2,10%
	2020	25.664.883.761	1.359.300.377.218	1,88%
	2021	32.822.654.372	1.295.553.732.105	2,53%
Rata-rata				2,40%

Daerah Pemekaran	Tahun	PAD	Total Daerah	Pendapatan	Rasio DDF
Kab. Padang Lawas Utara	2012	12.798.137.844	469.073.918.302		2,72%
	2013	15.804.225.377	485.462.361.482		3,25%
	2014	22.172.689.275	534.310.568.591		4,19%
	2015	26.446.077.261	587.826.044.111		4,49%
	2016	30.453.223.133	786.415.567.546		3,87%
	2017	74.524.919.693	743.163.196.552		10,02%
	2018	74.306.097.500	730.881.152.925		10,16%
	2019	42.929.111.658	832.241.719.696		5,15%
	2020	51.975.624.588	740.480.534.091		7,01%
	2021	43.312.600.311	1.057.023.907.870		4,09%
	Rata-rata				5,49%
Kab. Padang Lawas	2012	9.881.176.852	468.315.215.136		2,10%
	2013	23.140.067.442	475.542.560.223		4,86%
	2014	28.779.779.762	499.925.540.082		5,75%
	2015	34.707.409.094	602.936.592.276		5,75%
	2016	39.341.382.403	958.238.427.749		4,10%
	2017	46.509.729.525	733.166.717.579		6,34%
	2018	47.455.308.607	728.499.463.726		6,51%
	2019	52.067.312.091	813.079.155.434		6,40%
	2020	44.055.621.274	722.028.634.171		6,10%
	2021	46.759.858.387	980.634.255.295		4,76%
	Rata-rata				5,27%
Kota Padang Sidempuan	2012	23.622.308.246	503.526.726.660		4,69%
	2013	35.018.175.219	562.901.909.267		6,22%
	2014	58.725.449.620	624.135.723.887		9,40%
	2015	67.730.738.638	690.827.821.766		9,80%
	2016	78.417.755.706	733.910.221.631		10,68%
	2017	109.640.419.281	738.055.342.490		14,85%
	2018	75.063.575.093	696.624.009.415		10,77%
	2019	87.432.283.185	771.186.283.865		11,33%
	2020	52.067.312.091	671.793.613.115		7,75%
	2021	59.865.657.758	693.853.662.228		8,63%
	Rata-rata				9,41%
Kab. Humbang Hasundutan	2012	17.901.926.972	521.545.468.380		3,43%
	2013	17.632.873.686	582.118.417.092		3,02%
	2014	29.491.349.500	659.027.826.548		4,47%
	2015	35.237.805.568	688.152.694.930		5,12%
	2016	42.096.841.517	757.245.082.666		5,55%
	2017	85.598.357.027	747.590.892.703		11,44%
	2018	92.735.853.813	1.424.775.479.341		6,50%
	2019	73.757.931.630	768.373.327.819		9,59%
	2020	67.936.178.389	694.988.850.038		9,77%
	2021	26.917.795.029	836.661.144.896		3,21%
	Rata-rata				6,41%
Kabupaten Samosir	2012	17.459.630.443	433.397.998.904		4,02%
	2013	26.661.345.261	475.739.482.532		5,06%
	2014	36.849.574.657	513.867.087.315		7,17%
	2015	34.297.498.964	604.724.692.095		5,67%
	2016	39.268.200.307	654.385.660.164		6,00%
	2017	72.228.748.255	651.472.719.311		11,08%
	2018	47.446.623.389	624.704.277.117		7,59%
	2019	60.497.449.963	786.106.178.761		7,69%
	2020	60.373.806.630	820.837.882.649		7,35%
	Rata-rata				7,35%

Daerah Pemekaran	Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio DDF
	2021	61.871.566.524	765.487.548.445	8,08%
Rata-rata Keseluruhan				7,02%
				5.81%

Lampiran 3: Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal antara Daerah Induk dan Daerah Pemekaran

Daerah Induk	Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Kerasian Belanja
Kabupaten Asahan	2012	259.227.355.626	1.037.633.546.451	24.98%
	2013	271.753.134.393	1.143.614.491.115	23.76%
	2014	424.188.251.104	1.388.135.949.420	30.55%
	2015	227.438.269.630	1.395.720.714.939	16.29%
	2016	237.676.952.256	1.501.954.701.574	15.82%
	2017	335.709.185.426	1.662.687.124.428	20.19
	2018	230.200.116.402	1.623.250.765.025	14.18%
	2019	304.478.575.305	1.775.230.082.118	17.15%
	2020	146.983.023.065,00	1.603.180.726.931,23	9.16%
	2021	42.155.632.266	1.592.769.001.954	2.64%
Rata-rata				17.47%
Kabupaten Dairi	2012	97.984.281.704	593.188.127.145	16.51%
	2013	138.859.862.065	694.246.838.536	20.00%
	2014	155.712.106.277	745.528.686.138	20.88%
	2015	180.098.060.210	867.992.508.815	20.74%
	2016	217.941.187.120	993.346.050.057	21.94%
	2017	260.705.968.964	1.146.806.000.882	22.73%
	2018	201.561.437.853	1.109.939.980.976	18.18%
	2019	197.567.865.963	1.131.108.532.277	17.46%
	2020	139.598.777.988,80	1.058.398.984.995,80	13.18%
	2021	177.886.901.012	1.133.737.127.633	15.69%
Rata-rata				18.73%
Kabupaten Deli Serdang	2012	334.254.373.140	1.826.070.426.059	18.30%
	2013	352.334.308.750	2.034.622.488.869	17.31%
	2014	553.705.889.983	2.392.252.735.840	23.14%
	2015	491.710.226.083	2.735.624.354.971	17.97%
	2016	561.285.600.327	3.005.435.386.844	18.67%
	2017	741.456.897.033	3.377.738.242.084	21.95%
	2018	670.584.193.041	3.422.610.573.015	19.59%
	2019	703.280.070.640	3.601.407.369.876	19.52%
	2020	480.305.325.651	3.274.161.220.722	14.66%
	2021	520.913.969.424	3.473.760.778.916	14.99%
Rata-rata				18.61%
Kabupaten Labuhanbatu	2012	204.122.929.432	760.581.998.796	26.83%
	2013	226.693.798.700	827.146.775.327	27.40%
	2014	209.025.598.008	915.110.451.097	22.84%
	2015	185.515.383.315	1.019.728.251.640	18.19%
	2016	285.089.741.793	1.194.338.054.774	23.87%
	2017	277.921.020.653	1.259.797.171.354	22.06%
	2018	139.178.414.287	1.150.307.799.141	12.09%
	2019	238.729.009.917	1.367.519.966.302	17.45%
	2020	136.621.343.879	1.187.860.181.508	11.50%
	2021	135.676.696.803	1.266.143.502.120	10.71%
Rata-rata				19.29%

Daerah Induk	Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Keserasian Belanja
Kabupaten Nias	2012	153.104.934.965	404.093.407.445	37.88%
	2013	173.429.299.099	476.487.660.034	36.39%
	2014	158.098.310.646	512.571.338.927	30.84%
	2015	194.330.739.832	666.992.376.342	29.13%
	2016	227.559.502.344	796.586.640.124	28.56%
	2017	239.523.860.631	881.983.873.162	27.15%
	2018	207.016.876.763	930.217.782.108	22.25%
	2019	190.454.026.585	975.280.101.395	19.52%
	2020	145.345.768.616	902.078.522.718	16.11%
	2021	103.446.741.624	839.402.042.495	12.32%
Rata-rata				26.02%
Kabupaten Tapanuli selatan	2012	194.193.714.364	676.023.654.714	28.72%
	2013	267.454.272.679	842.846.295.842	31.73%
	2014	222.350.225.386	862.248.440.427	25.78%
	2015	303.915.012.639	1.119.177.035.203	27.15%
	2016	307.152.296.664	1.176.894.126.494	26.09%
	2017	277.231.852.741	1.196.223.540.989	23.17%
	2018	363.140.233.295	1.315.263.549.408	27.60%
	2019	420.660.057.835	1.463.791.932.224	28.73%
	2020	315.936.844.132	1.350.731.462.450	23.39%
	2021	236.974.942.898	1.297.150.101.430	18.26%
Rata-rata				26.06%
Kabupaten Tapanuli utara	2012	171.508.170.212	737.700.051.049	23.24%
	2013	206.895.522.616	834.384.699.583	24.79%
	2014	146.464.311.063	816.538.465.051	17.93%
	2015	240.549.906.381	1.097.187.075.012	21.92%
	2016	238.928.406.088	1.251.194.183.763	19.09%
	2017	155.844.953.910	1.203.503.299.522	12.94%
	2018	181.662.031.464	1.293.977.148.594	14.03%
	2019	194.947.102.075	1.306.760.873.867	14.91%
	2020	339.159.979.339	1.486.351.970.646	22.81%
	2021	287.918.257.694	1.473.274.599.070	19.54%
Rata-rata				19.12%
Kabupaten Toba	2012	153.980.867.116	619.897.003.865	24.83%
	2013	125.576.942.925	645.159.251.733	19.46%
	2014	156.147.145.528	770.864.744.416	20.25%
	2015	154.106.801.573	847.198.141.270	18.19%
	2016	181.212.965.236	1.010.631.910.908	17.93%
	2017	199.230.031.160	1.100.661.584.285	18.10%
	2018	152.970.216.966	1.055.027.173.780	14.49%
	2019	135.339.350.834	1.061.087.958.908	12.75%
	2020	66.583.199.217	997.957.281.587	6.67%
	2021	117.113.376.689	1.015.089.494.025	11.53%
Rata-rata				
Rata rata Keseuruhan				

Lampiran 4: Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan pada Daerah Induk dan Daerah Pemkaran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021(Juta Rupiah)

Daerah	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Asahan	17872.41	18892.62	20004.51	21118.75	22302.70	23525.35	24844.87	26245.24	26299.57	27279.59
Kab.Batu Bara	17916.36	18674.62	19459.38	20259.69	21165.04	22034.26	22998.60	23998.59	23923.64	24486.06
Kab. Dairi	4671.00	4906.86	5153.83	5413.75	5688.45	5968.81	6267.82	6569.81	6508.05	6641.67
Kab.Pakpak Bharat	569.86	603.55	639.29	677.18	717.89	760.55	805.01	852.30	850.79	872.40
Kab. Deli Serdang	47513.87	51896.06	55793.75	58722.46	61839.67	64991.87	68341.00	71878.69	70596.83	72173.62
Kab. Serdang Bedagai	13558.85	14345.76	15080.38	15841.75	16656.17	17516.43	18421.38	19393.39	19308.46	19863.24
Kab. Labuhanbatu	16289.98	17263.41	18164.10	19079.93	20046.02	21048.17	22112.34	23232.71	23252.75	24147.56
Kab. Labuhanbatu Selatan	13024.49	13812.09	14547.52	15294.17	16088.42	16907.59	17797.95	18750.16	18899.31	19620.41
Kab. Labuhanbatu Utara	11978.44	12729.04	13414.53	14109.37	14843.99	15602.05	16413.33	17259.19	17306.59	17969.26
Kab. Nias	1776.05	1888.76	1991.99	2100.11	2214.15	2325.01	2440.16	2563.03	2609.14	2666.86
Kab.Nias Utara	1645.93	1750.25	1847.62	1948.00	2043.91	2134.49	2228.75	2332.44	2369.36	2417.20
Kab. Nias Barat	877.93	923.29	970.55	1017.80	1074.48	1126.19	1179.91	1236.73	1257.28	1285.66
Kab. Gunung Sitoli	2276.15	2417.72	2565.26	2703.50	2876.34	3049.12	3232.97	3428.45	3441.65	3519.13
Kab. Nias Selatan	3074.46	3217.40	3356.39	3506.03	3659.77	3826.62	4018.74	4221.04	4246.83	4332.63
Kab. Tapanuli Selatan	6150.49	7222.61	7542.78	7921.24	8314.69	8748.18	9201.96	9683.66	9721.77	10036.71
Kab. Padang Lawas Utara	5531.49	5871.51	6228.35	6598.30	6991.66	7378.98	7791.05	8228.45	8322.51	8593.64
Kab. Padang Lawas	5332.02	5659.61	5997.31	6341.53	6725.98	7110.25	7534.30	7959.31	8053.50	8362.13
Kota Padang Sidempuan	2952.72	3124.02	3285.46	3451.08	3636.87	3830.32	4038.93	4261.32	4230.41	4346.78
Ka. Tapanuli Utara	4198.63	4419.77	4645.42	4868.95	5070.19	5280.69	5510.19	5764.94	5851.40	6058.35
Kab. Humbang Hasundutan	2948.18	3085.20	3249.45	3419.57	3577.05	3756.66	3946.12	4141.10	4135.60	4219.14
Kab. Toba	3985.21	4178.50	4355.07	4553.17	4767.98	5001.43	5249.25	5503.76	5488.92	5649.10
Kab. Samosir	2105.65	2234.09	2367.10	2503.73	2635.77	2776.85	2931.70	3098.74	3080.43	3162.10

Lampiran 5: Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Pemakran di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2021

1. Kinerja Desentralisasi Fiskal

Kabupaten/Kota	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Rata-rata	Kinerja
Kab. Asahan	3.64	1	4.46	1	6.15	1	6.98	1	3.37	1	8.31	1	8.84	1	8.67	1	9.78	1	8.19	1	6.84	1
Kab.Batu Bara	2.53	1	3.53	1	5.14	1	5.60	1	5.43	1	6.29	1	6.11	1	10.83	1	14.07	1	14.93	1	7.45	1
Kab. Dairi	3.41	1	4.16	1	6.98	1	6.60	1	6.39	1	11.31	1	21.69	1	6.36	1	9.78	1	6.33	1	8.30	1
Kab.Pakpak Bharat	2.04	1	2.32	1	3.31	1	3.35	1	3.65	1	5.71	1	3.74	1	5.73	1	4.43	1	4.62	1	3.89	1
Kab. Deli Serdang	15.69	1	15.66	1	17.70	1	18.52	1	18.41	1	25.48	2	21.69	1	23.09	1	8.50	1	26.16	2	19.09	1
Kab. Ser. Bedagai	4.48	1	5.09	1	6.87	1	6.31	1	7.53	1	7.47	1	12.44	1	9.09	1	8.02	1	8.53	1	7.58	1
Kab. Labuhanbatu	7.77	1	6.01	1	12.77	1	9.97	1	9.85	1	10.70	1	13.33	1	13.29	1	13.71	1	17.74	1	11.51	1
Kab. L. Batu Sel	2.82	1	3.39	1	4.17	1	4.03	1	4.31	1	5.01	1	5.51	1	6.47	1	5.73	1	5.66	1	4.71	1
Kab. L. Batu Utara	3.74	1	4.31	1	5.34	1	4.42	1	4.81	1	9.77	1	5.87	1	7.78	1	6.48	1	6.73	1	5.92	1
Kab. Nias	7.77	1	6.01	1	12.77	1	9.97	1	9.85	1	10.70	1	13.33	1	13.29	1	13.71	1	17.74	1	11.51	1
Kab.Nias Utara	2.02	1	2.15	1	2.23	1	2.82	1	3.51	1	2.90	1	6.71	1	6.55	1	6.55	1	2.71	1	3.81	1
Kab. Nias Barat	1.68	1	2.21	1	2.76	1	3.11	1	2.92	1	5.61	1	5.61	1	2,46	1	3.01	1	2.85	1	3.22	1
Kota. Gunung Sitoli	2.13	1	2.29	1	3.75	1	3.90	1	4.13	1	4.30	1	4.19	1	4.40	1	3,62	1	3.02	1	6.85	1
Kab. Nias Selatan	2.89	1	5.12	1	1.99	1	1.84	1	1.61	1	1.63	1	1.68	1	1.95	1	1,13	1	2.34	1	2.22	1
Kab. Tapanuli Selatan	7.73	1	8.54	1	10.72	1	10.04	1	6.34	1	8.39	1	10.23	1	11.38	1	10.12	1	8.85	1	9.23	1
Kab. Pdg L. Utara	2.20	1	2.55	1	3.67	1	4.37	1	2.90	1	6.69	1	6.98	1	4	1	4.62	1	3.76	1	4.13	1
Kab. Pdg Lawas	2.03	1	4.29	1	4.87	1	4.83	1	3.94	1	4.54	1	4.60	1	4.58	1	4.24	1	4.38	1	4.23	1
Kota Pdg Sidempuan	4.37	1	5.59	1	8.33	1	8.76	1	9.59	1	12.28	1	9.28	1	9.87	1	4.58	1	7.68	1	8.03	1
Kab. Tapanuli Utara	4.68	1	4.45	1	7.29	1	7.40	1	7.91	1	13.30	1	8.18	1	8.55	1	10.33	1	11.47	1	8.36	1
Kab. Hum Hasun	3.24	1	2.80	1	4.08	1	4.55	1	4.71	1	9.00	1	10.10	1	7.31	1	7.23	1	3.10	1	5.61	1
Kab. Toba	2.52	1	2.76	1	3.41	1	3.59	1	5.52	1	4.79	1	5.25	1	6.32	1	5.70	1	4.43	1	4.43	1
Kab. Samosir	3.89	1	5.03	1	6.00	1	5.05	1	5.04	1	8.76	1	5.91	1	6.83	1	7.56	1	7.25	1	6.13	1

Tidak Baik

2. Kinerja Kemandirian Daerah

Kabupaten/Kota	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Rata-rata	Kinerja
Kab. Asahan	4,25	1	6,04	1	6,58	1	7,56	1	3,55	1	10,11	1	10,45	1	10,16	1	11,7	1	9,59	1	8	1
Kab.Batu Bara	2,75	1	4,14	1	5,82	1	6,05	1	5,79	1	7,09	1	6,93	1	12,99	1	17	1	17,49	1	8,6	1
Kab. Dairi	3,49	1	4,41	1	7,56	1	7,17	1	6,96	1	14,62	1	7,76	1	7,23	1	17,56	1	7,19	1	15,28	1
Kab.Pakpak Bharat	2	1	2,48	1	3,52	1	2,56	1	3,79	1	6,06	1	3,94	1	6,9	1	5,32	1	4,98	1	4,26	1
Kab. Deli Serdang	19,65	1	18,69	1	21,61	1	22,79	1	22,61	1	39,08	2	37,07	2	31,91	2	39,5	2	37,77	2	24,85	1
Kab. Ser. Bedagai	4,91	1	5,82	1	7,44	1	7,19	1	8,18	1	8,15	1	14,61	1	12,27	1	10,84	1	9,16	1	8,86	1
Kab. Labuhanbatu	8,56	1	6,95	1	14,64	1	12,25	1	11,52	1	12,76	1	16,64	1	17,32	1	18,63	1	23,23	1	14,25	1
Kab. L. Batu Sel	3,86	1	4,5	1	5,78	1	4,84	1	5,11	1	10,88	1	6,59	1	9,02	1	7,39	1	7,57	1	6,55	1
Kab. L. Batu Utara	3,99	1	4,33	1	4,82	1	4,49	1	4,56	1	5,97	1	5,9	1	7,91	1	6,5	1	6,31	1	5,48	1
Kab. Nias	7,83	1	10,73	1	14,46	1	11,65	1	11,32	1	12,83	1	11,46	1	13,05	1	18,26	1	13,96	1	12,56	1
Kab.Nias Utara	2,01	1	2,31	1	2,32	1	3,31	1	4,1	1	3,5	1	8,62	1	7,11	1	8,12	1	2,91	1	4,43	1
Kab. Nias Barat	1,71	1	2,29	1	2,86	1	3,59	1	3,02	1	5,95	1	5,99	1	2,66	1	3,05	1	3,05	1	3,42	1
Kota. Gunung Sitoli	2,19	1	2,35	1	3,89	1	4,1	1	4,32	1	5,16	1	4,54	1	4,83	1	4,53	1	3,27	1	3,92	1
Kab. Nias Selatan	3,01	1	5,39	1	2,03	1	1,9	1	1,63	1	1,66	1	1,81	1	2,1	1	1,88	1	2,53	1	2,4	1
Kab. Tapsel	8,94	1	9,34	1	12,01	1	12,28	1	6,95	1	11,3	1	12,1	1	13,66	1	12,05	1	10,24	1	10,89	1
Kab. Pdg L. Utara	2,72	1	3,25	1	4,19	1	4,49	1	3,87	1	10,02	1	10,16	1	5,15	1	7,01	1	4,09	1	5,49	1
Kab. Pdg Lawas	2,1	1	4,86	1	5,75	1	5,75	1	4,1	1	6,34	1	6,51	1	6,4	1	6,1	1	4,76	1	5,27	1
Kota Pdg. Sdp	4,69	1	6,22	1	9,4	1	9,8	1	10,68	1	14,85	1	10,77	1	11,33	1	7,75	1	8,63	1	9,41	1
Kab. Tapanuli Utara	5,12	1	4,98	1	8,15	1	8,13	1	8,73	1	15,39	1	9,51	1	10,04	1	10,2	1	12,32	1	9,26	1
Kab. Hum Hasun	3,43	1	3,02	1	4,47	1	5,12	1	5,55	1	11,44	1	6,5	1	9,59	1	9,77	1	3,21	1	6,21	1
Kab. Toba	3,09	1	3,47	1	3,74	1	4,14	1	6,9	1	6,09	1	5,76	1	7,01	1	6,31	1	7,78	1	5,43	1
Kab. Samosir	4,02	1	5,06	1	7,17	1	5,67	1	6	1	11,08	1	7,59	1	7,69	1	7,35	1	8,08	1	7,02	1

Tidak Baik

3. Kinerja Keserasian Belanja Modal

Kabupaten/Kota	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Rata-rata	Kinerja
Kab. Asahan	24.98	1	23.76	1	30.55	1	16.29	2	15.82	2	20.19	1	14.18	2	17.15	2	9.16	3	2.64	4	17.47	1,3
Kab.Batu Bara	26.28	1	26.97	1	26.53	1	25.23	1	28.39	1	23.45	1	14.04	2	18.58	2	17.19	2	17.73	2	22.44	1
Kab. Dairi	16.51	2	20.00	2	20.88	1	20.74	1	21.94	1	22.73	1	18.18	2	17.46	2	13.18	2	15.69	2	18.73	1,3
Kab.Pakpak Bharat	23.67	1	38.75	1	34.67	1	31.96	1	29.97	1	23.53	1	22.93	1	24.99	1	12.88	2	12.36	2	25.57	1
Kab. Deli Serdang	18.30	2	17.31	2	23.14	1	17.97	2	18.67	2	21.95	1	19.59	2	19.52	2	14.66	2	14.99	2	18.61	2
Kab. Ser. Bedagai	17.84	2	25.49	1	18.15	2	17.85	2	19.86	2	17.15	2	22.28	1	19.90	2	15.48	2	24.75	1	19.88	1,2
Kab. Labuhanbatu	26.83	1	27.40	1	22.84	1	18.19	2	23.87	1	22.06	1	12.09	2	17.45	2	11.50	2	10.71	2	19.29	1,2
Kab. L. Batu Sel	36,88	1	38,15	1	28,31	1	25,23	1	26,24	1	20,77	1	22,84	1	22,71	1	10,58	2	14,36	2	24.61	1
Kab. L. Batu Utara	32.79	1	46.51	1	36.84	1	34.00	1	34.09	1	30.33	1	25.18	1	23.23	1	16.33	2	17.04	2	29.63	1
Kab. Nias	37.88	1	36.39	1	30.84	1	29.13	1	28.56	1	27.15	1	22.25	1	19.52	2	16.11	2	12.32	2	26.02	1
Kab.Nias Utara	32.01	1	41.70	1	31.70	1	35.57	1	33.32	1	34.82	1	25.75	1	30.76	1	21.82	1	16.10	2	30.35	1
Kab. Nias Barat	38.56	1	44.91	1	41.35	1	38.30	1	27.73	1	31.48	1	34.94	1	25.43	1	18.34	2	10.81	2	31.19	1
Kota. Gunung Sitoli	36.81	1	36.94	1	35.99	1	35.81	1	36.84	1	32.08	1	26.11	1	21.40	1	20.28	1	21.46	1	30.37	1
Kab. Nias Selatan	32.64	1	31.19	1	27.66	1	21.62	1	15.15	2	17.62	2	18.88	2	18.25	2	18.86	2	17.36	2	21.92	1
Kab. Tapsel	28.72	1	31.73	1	25.78	1	27.15	1	26.09	1	23.17	1	27.60	1	28.73	1	23.39	1	18.26	2	26.06	1
Kab. Pdg L. Utara	40.75	1	32.84	1	29.22	1	24.35	1	21.99	1	26.37	1	18.12	2	20.78	1	14.05	2	14.29	2	24.27	1
Kab. Pdg Lawas	26.56	1	27.23	1	20.15	1	28.84	1	22.62	1	21.47	1	19.16	2	21.12	1	13.84	2	13.53	2	21.45	1
Kota Pdg. Sdp	18.73	2	19.06	2	15.53	2	15.29	2	18.65	2	22.07	1	13.76	2	16.28	2	9.62	2	13.26	2	16.22	1,2
Kab. Tapanuli Utara	23.24	1	24.79	1	17.93	2	21.92	1	19.09	2	12.94	2	14.03	2	14.91	2	22.81	1	19.54	2	19.12	1
Kab. Hum Hasun	24.33	1	31.50	1	31.95	1	25.41	1	25.36	1	23.42	1	18.37	2	17.89	2	12.59	2	14,36	2	22.5	1
Kab. Toba	24.83	1	19.46	2	20.25	1	18.19	2	17.93	2	18.10	2	14.49	2	12.75	2	6.67	3	11.53	2	16.42	1,2
Kab. Samosir	20.58	1	31.10	1	29.28	1	26.56	1	29.02	1	25.95	1	23.17	1	19.19	2	13.35	2	17.85	2	23.60	1

**Tidak
Baik**

